PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGAM *FAMILY DEVELOPMENT SESSIONS*S (FDS) DI DUSUN KRAJAN DESA CAMPUREJO, KECAMATAN PANCENG, KABUPATEN GRESIK

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

M. Haqiqi Abidallah

Nim E04213069

PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

S U R A B A Y A

2019

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama	: Muhammad Haqiqi Abidallah
NIM	: E04213069
Jurusan	: Politik Islam
Judul Skripsi	: Partisipasi Masyarakat Terhadap Progam Family Development Session (FDS) Di Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

MUHAMMAD HAQIQI ABIDALLAH

NIM: E04213069

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi. Skripsi oleh *Muhammad Haqiqi Abidallah* ini telah disetujui pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 23 juli 2019

Pembimbing

Dr. KHOIRUL YAHYA, M.Si
NIP. 197202062007101003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh M Haqiqi Abidallah ini telah dipertahankan didepan penguji skripsi pada tanggal 28 juli 2019.

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 19640918199031002

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. khoirul Yahya, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji II

M. Anas Fakhrudin, M.Si
NIP. 198202102009011007

Penguji III

Dr. Anik Nurhayati, M.Si

Penguji IV

Laili Bariroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Haqiqi Abidallah
NIM : E04213069
Fakultas/Jurusan : Ushuludin dan Filsafat/Filsafat Politik Islam
E-mail address : Haqiqi.abid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Progam Family Development sessions (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis

(M. Haqiqi Abidallah)
E04213069

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Family Development Sessions (FDS) merupakan kegiatan belajar Keluarga Penerima Manfaat PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis yang meliputi komponen PKH, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan dengan tujuan Keluarga Penerima Manfaat mampu merubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Progam tersebut pertama kali dilaksanakan di Dusun Krajan pada tahun 2015. Partisipasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam kaitannya dengan progam FDS ini. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini, yaitu (1) bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *Family Development sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Gresik ?. dan (2) bagaimana proses para penerima progam dalam mendapatkan manfaat dari progam *Family Development sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Gresik ?

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *Family developments sessions*(FDS) di Dusun Krajan. Dan proses para penerima progam dalam mendapatkan manfaat dari progam *Family Development sessions* (FDS) di Dusun Krajan. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan kemudian dianalisis dengan teori partisipasi dan bentuk partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Desa Campurejo terdiri dari 3 bentuk, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pengambillan manfaat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan evaluasi progam. Sementara ke aktifan dalam partisipasi ditunjukan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam pelaksanaan. Sedangkan dalam proses pengambilan manfaat, bentuk manfaat yang diterima oleh masyarakat berupa membuat catatan kas harian, anggaran bulanan, anggaran usaha, memulai usaha dan pengetahuan tentang mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan benar.

Kata kunci: Progam Keluarga harapan, *Family Development Sessions* (FDS), partisipasi politik, bentuk partisipasi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Family Development Sessions (FDS) are PKH Beneficiary Family learning activities in the form of giving and discussing practical information including PKH components, which are delivered through monthly group meetings with the aim of Beneficiary Families being able to change behavior patterns in daily life. The program was first implemented in Krajan Hamlet in 2015. Participation is important in relation to this FDS program. This study uses two formulations of the problem to be discussed in this thesis, namely (1) how is the form of community participation in the implementation of the Family Development sessions (FDS) program in Krajan Hamlet, Campurejo Village, Panceng Gresik District ?. and (2) what is the process of program beneficiaries in getting benefits from the Family Development sessions (FDS) program in Krajan Hamlet, Campurejo Village, Panceng Gresik District?

The purpose of this study is to describe and explain the forms of community participation in the implementation of the Family developments sessions (FDS) program in Krajan Hamlet. And the process of program beneficiaries in benefiting from the Family Development sessions (FDS) program in Krajan Hamlet. To answer this problem, this research uses descriptive qualitative research methods by collecting data using interview, observation and documentation techniques. And then analyzed with participation theory and forms of community participation.

The results showed that the form of community participation in Campurejo Village consisted of 3 forms, namely participation in decision making, participation in implementation and participation in benefiting. The community was not involved in the program evaluation activities. While participation in participation is shown by the community in the form of participation in implementation. While in the process of taking benefits, the form of benefits received by the community in the form of making daily cash records, monthly budgets, business budgets, starting a business and knowledge about educating and caring for children properly.

Keywords: Family Hope Program, Family Development Sessions (FDS), political participation, forms of community participation.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
ABSTRAK iii
LEMBAR PERSETUJUAN v
LEMBAR PENGESAHAN vi
LEMBAR PERNYATAAN vii
MOTTO viii
LEMBAR PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Penelitian terdahulu 12
F. Metode Penelitian 16
G. Fokus Penelitan 22
H. Sistematika Pembahasan 23
BAB II : KAJIAN TEORI
A. Pengertian Partisipasi masyarakat.
1. Pengertian partisipasi 25
2. Pengertian Masyarakat 26
3. Pengertian Partisipasi Masyarakat 27
4. Partisipasi Politik 32
B. Kebijakan Publik 37
C. Progam *Family Development Sessions* (FDS) 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : SETTING PENELITIAN

A. Profil Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 52

B. Kegiatan Progam Keluarga Harapan di Dusun Krajan Desa Campurejo 54

C. Progam *Family Development Sessions* (FDS) dalam progam keluarga harapan di Dusun Krajan Desa Campurejo.....61

BAB IV : ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Progam *Family Development Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo kecamatan Panceng Kabupaten Gresik..... .65

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 67
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.....74
3. Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan 79
4. Partisipasi dalam evaluasi 85

B. Proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo kecamatan Panceng Kabupaten Gresik..... 95

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 107

B. Saran …….. 109

DAFTAR PUSTAKA..... 110

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data PKH Kecamatan Panceng 2019.....7

Tabel 3.1 : Batas Wilayah 54

Tabel 3.2 : Jumlah KPM Dusun Krajan Tahun 2018-2019..... 62

Tabel 4.1 : Tipologi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo 92

Tabel 4.2 : Proses perubahan KPM dalam progam FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Peta Dusun krajan 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Progam Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu progam andalan yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial sebagai pelaksana progam yang bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait dengan permasalahan sosial seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Awal mula rencana PKH adalah inisiatif Bappenas yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang telah lebih dulu diterapkan di dunia internasional seperti Amerika, China dan juga India yang populer dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Progam ini terbukti cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan akut.[1]

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai

[1] https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 11:30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Eersama (KUBE) termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.[2]

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan. Komponen pendidikan. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial, dan penyandang disabilitas. KPM

[2]https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 11:30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.[3]

Dalam realisasinya PKH memang mempunyai dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, hal itu dibuktikan dengan banyaknya warga yang merasa terbantu dengan adanya bantuan dari PKH karena dapat meminimalisir pengeluaran kehidupan sehari-hari karena bantuan PKH mencakup beberapa aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan dan lansia. Selain menjadi progam bantuan sosial, PKH juga bertujuan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Masa kepesertaan penerima bantuan PKH dirancang selama 6 tahun, dengan asumsi selama masa kepesertaan terjadi perubahan perilaku dalam bidang pendidikan kesehatan dan status sosial ekonomi keluarga. Untuk

[3]https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, diakses pada pukul 11:30 WIB tanggal 25 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesuksesan rancangan tersebut, pada tahun kelima kepesertaan PKH akan didata ulang melalui kegiatan Resertifikasi. Proses ini merupakan evaluasi atas kepemilikian komponen kepesertaan PKH dan status sosial ekonomi KPM PKH. Bila hasil resertifikasi menunjukkan perubahan status sosial ekonomi atau tidak memiliki komponen kepesertaan PKH, maka pada tahun keenam KPM PKH dapat keluar dari program (graduasi). Jika belum dianggap layak keluar (transisi), para KPM PKH akan dibekali dengan kegiatan P2K2 dan progam komplementaritas berbasis ekonomi maupun program perlindungan sosial yang terintegrasi dan relevan sehingga membantu para peserta meningkatkan daya dan kapasitas kesejahteraannya hingga mandiri.[4]

Dalam rangka membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, PKH mempunyai beberapa progam yang disusun Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan sebagai bentuk usaha pengentasan kemiskinan dan progam komplementaris PKH. Salah satu progam usaha pengentasan kemiskinan masyarakat dalam PKH adalah *Family Develompment Sessions* (FDS). *Familiy Develompment Sessions* (FDS) adalah usaha meningkatkan kapasitas atau kemampuan keluarga dalam menjalani kehidupannya melalui proses belajar. Kegiatan FDS adalah kegiatan pembelajaran dengan berbagai materi praktis, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Masing-masing materi terangkum dalam suatu modul dengan berbagai sesi yang berurutan. Modul FDS dikembangkan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga

[4]Pedoman umum PKH Tahun 2017., 23-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapan (UPPKH) Pusat. Kegiatan FDS dilakukan satu bulan sekali dengan durasi 2 jam. Fasilitator dalam kegiatan FDS yaitu pendamping PKH. Sebelum melakukan fasilitasi FDS, pendamping PKH harus mengikuti diklat FDS terlebih dahulu. Kegiatan FDS adalah kegiatan belajar bagi peserta PKH yang akan mendorong terciptanya masyarakat yang gemar belajar.[5]

Program FDS ini menjadi program Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan *World Bank* dan *Unicef* untuk memberikan pelatihan kepada KPM melalui pendampingnya agar KPM tersebut mengerti tentang pola hidup yang sederhanan dan mapan. KPM diharapkan untuk menerapkan dan melakukan materi-materi FDS yang telah disampaikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masalah-masalah sosial yang dihadapi setiap KPM dapat teratasi dan dapat menjalani pola hidup yang terus maju untuk terlepas dari garis kemiskinan. Adanya program FDS dalam PKH ini menjadi salah satu upaya Pemerintah melakukan pendekatan *multidimensional* dalam penanggulangan kemiskinan.

Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten yang terkenal dengan Kota Industrinya. Dimana terdapat banyak Industri besar yang berkembang di Kabupaten Gresik salah satunya adalah Semen Gresik yang sekarang berubah menjadi Semen Indonesia. Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kabupaten Gresik bisa dibilang cukup padat. Hal itu dapat dilihat dari proyeksi penduduk Kabupaten Gresik tahun 2018 sebesar

[5]https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan/family-development-session, diakses pada pukul 11:30 WIB tanggal 25 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

644.099 penduduk laki-laki dan 654.925 penduduk perempuan, total proyeksi penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.299.024 jiwa.[6] Meskipun terkenal dengan Kota Industri namun angka dan jumlah penduduk miskin dapat dikatakan cukup banyak dan sedikit mengalami penurunan. Hal itu dapat dilihat dari tahun 2013, angka kemiskinan 13,89 % dan jumlah penduduk miskin 170.900 jiwa. Dan tahun 2018, angka kemiskinan 12,8 % dan jumlah penduduk miskin 168.000 jiwa.[7]

Di Kabupaten Gresik, PKH telah ada sejak tahun 2007, merupakan perubahan terhadap Bantuan Tunai Langsung (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan sosial lainya yang kemudian terangkum dalam PKH. PKH merupakan bantuan komplementer yang mencakup beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan juga ekonomi serta kesejahteraan sosial lainya. Adapun kriteria komponen PKH adalah sebagai berikut, *pertama*, komponen pendidikan adalah anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. *Kedua*, komponen kesehatan adalah ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. *Ketiga*, komponen kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas adalah lanjut usia

[6] Badan Pusat Statistik jatim tahun 2018
[7] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.[8]

Kecamatan Panceng merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik yang terletak di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. PKH telah ada di Kecamatan Panceng sejak tahun 2007 yang saat itu masih berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pengambilan dananya melalui kantor pos dan bantuan lain sebagainya. Masyarakat kurang mampu juga masih banyak di Kecamatan ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menerima bantuan PKH. Adapun data KPM Kecamatan Panceng dapat diketahui sebagai berikut:[9]

Table 1.1

Data PKH Kecamatan Panceng 2019

Desa	Pendamping	Jumlah KPM
Prupuh dan Dalegan	Abdul Rohman, S.S	413 KPM
Sumurber dan Doudo	Amalin, S.Ag	306 KPM
Siwalan Dan Ketanen	Digno, S.Ag	328 KPM
Surowiti dan Wotan	Heppy Ahmad Washi, SH	310 KPM
Campurejo	Jumanan, SE, Uswatun Khasanah dan Bahrul	684 KPM

[8] Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018. Pasal 5, 6-7
[9] Data UPPKH Kecamatan Panceng Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Huda, S.Sos	
Sera dan Sukodono	Mftahul Ulum	279 KPM
Banyu tengah dan Pantenan	Musholihatin, SE, SY	306 KPM
Petung	Uzlifafatul Ummah	299 KPM
Jumlah		**2.925 KPM**

Sumber: UPPKH Kecamatan Panceng Juni 2019

Menurut kebijakan pelaksanaan Progam Keluarga Harapan tahun 2017, perjalanan P2K2 di bagi atas tahapan- tahapan dalam pelaksanaanya antara lain :

1. Tahun 2013-2014. P2K2 disusun dan diuji coba di 3 provinsi (DKI, JABAR, dan JATIM) dengan melatih 440 pendamping PKH.
2. Tahun 2015. Diklat P2K2 mulai secara regular dilakukan dengan melatih 1040 pendamping *khohort* 2007-2008 dari 11 provinsi.
3. Tahun 2016. Inisiatif baru PKH-P2K2 diberikan kepada semua KPM PKH. P2K2 menjadi bagian dari business proses PKH.
4. Tahun 2017-2019. Pelaksanaan diklat dan sosialisasi P2K2 secara luas. Pelaksanaan P2K2 bagian dari ukuran kinerja pendamping PKH.[10]

Karena itu, dalam pelaksanaannya tidak semua Desa melakukan FDS secara serentak dikarenakan kurangnya tenaga pendamping PKH yang mengikuti diklat FDS sebagai syarat untuk melakukan Progam FDS. Menurut

[10]Dirjen perlindungan dan jaminan social, *kebijakan pelaksanaan progam keluarga harapan tahun 2017*.Disampaikan pada diklat family development session.Padang, 9 maret 2017, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kordinator Pendamping PKH Kecamatan Panceng, pendamping PKH di Kecamatan Panceng berjumlah 9 pendamping. 4 pendamping pada diklat tahun 2015 serta 3 pendamping diklat tahun 2016 dan 2 pendamping melakukan diklat P2K2 ditahun 2018. Progam FDS di Kecamatan Panceng dilakukan sejak tahun 2015. Desa dampingan yang melakukan saat itu ada 3 Desa, yaitu Desa Campurejo, Desa Dalegan dan Desa Doudo. Selanjutnya tahun 2018 dilakukan secara menyeluruh.

Dusun Krajan adalah salah satu Dusun yang ada di Desa Campurejo yang merupakan Desa yang berada di Kecamatan Panceng. Pelaksanaan *Family Development Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo berjalan belum seperti yang diharapkan. Hal itu dapat diketahui melalui kesadaran masyarakat terhadap potensi lokal yang ada tidak dimanfaatkan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat, contohnya masyarakat tidak memulai usaha dan bergantung terhadap pekerjaan suaminya yang rata-rata nelayan. Hal yang menonjol adalah rendahnya graduasi mandiri KPM yang memperoleh bantuan PKH sehingga setiap tahun jumlah KPM yang memperoleh bantuan PKH semakin bertambah.

Menurut pendamping PKH Dusun Krajan Desa Campurejo, Pak Jumanan mengatakan bahwa jumlah kemiskinan masyarakat Dusun Krajan masih tinggi sehingga membutuhkan bantuan PKH lebih luas lagi karena masih banyak masyarakat miskin yang belum tercakup dalam PKH. Namun tingkat tranformasi kepesertaan di Dusun Krajan Desa Campurejo juga dapat dikatakan cukup rendah. Seperti KPM *khohort*/angkatan 2007 masih aman dan banyak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat bantuan karena masih memiliki komponen PKH serta jarang terjadi transformasi kepesertaan, meskipun ada, jumlahnya tidak terlalu besar. Angka tranformasi kepesertaan yang begitu rendah membuat progam FDS menjadi progam yang cukup penting.[11]

Keberhasilan sebuah progam tidak akan lepas dari peran partisipasi masyarakat itu sendiri. Dimana peran masyarakat sangat sentral dalam menentukan keberhasilan atau kesuksesan sebuah progam. Maka dari itu dalam penerapan sebuah progam dibutuhkan peran aktif dari masyarakat agar progam tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Peran masyarakat dapat berupa pengetahuan,tindakan maupun lain sebagainya.

Dalam Progam *Family Development Sessions*, KPM dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam setiap sesi pertemuan yang dilakukan. Karena unsur KPM sangat berpengaruh terhadap hasil dari Progam FDS sendiri. Dimana KPM diharapkan mampu menerapkan dan memahami apa yang diproleh dari FDS itu sendiri.

Menurut Rodliyah, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi. Partisipasi masyarakat mampu untuk meningkatkan kemampuan penerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun

[11] Jumanan, Wawancara, Campurejo, 6 mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung sejak dari gagasan perumusan kebijakan hingga pelaksanaan progam.[12]

Dari uraian diatas, maka menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *Family Development Sessionss* (FDS) sehingga mampu mengukur keberhasilan dan manfaat progam bagi Peserta KPM dan masyarakat lainya.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka, untuk lebih memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini. Peneliti, menyajikan rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Terhadap pelaksanaan Progam *Family Development Sessions* di Dusun Krajan Desa Campurejo?
2. Bagaimana proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo*?*

C. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat Terhadap pelaksanaan Progam *Family Development Sessions* di Dusun Krajan Desa Campurejo.

[12]Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di sekolah.*(Yogyakarta: P ustaka Pelajar 2013), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penilitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

   Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur yang bermanfaat sebagai bahan kajian ilmu politik.

2. Manfaat Praktis.

   Sebagai salah satu referensi dalam memahami implementasi Progam Keluarga Harapan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat miskin dan sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara pribadi.

E. Penelitian Terdahulu.

Penelitian mengenai *Family Development Sessions* (FDS) telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut : *Pertama,* Evaluasi Program *Family Develompent Sessions* Di Desa Kebundalem Lor, Prambanan, Klaten (Studi Survei di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Prambanan) yang disusun oleh Fikri Nurcahya NIM 11102241012 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2015.[13] Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi (1) tingkat efisiensi program *Family Development Sessions*, (2) tingkat efektifitas program *Family Development Sessions*, dan (3) tingkat responsivitas program Familly Development Session di kelompok Program Keluarga Harapan Desa Kebundalem Lor, Prambanan, Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian survei evaluatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) persentase efisiensi program Familly Development Session yaitu 84,0% berada pada kategori sangat baik. (2) Persentase efektivitas program Familly Development Session yaitu 85,7% berada pada kategori sangat baik. (3) Persentase responsivitas Familly Development Session yaitu 81,8% berada pada kategori sangat baik.

Kedua, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Studi Pada Kegaiatan Family Devlopment Sessions Di Desa Manduro Manggunggajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Yang disusun oleh Ayu Tifani Kartika Putri Jurusan Ilmu Admisnistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. [14] Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan

---

[13]Fikri Nurcahya, 2015, *Evaluasi Program Family Develompent Sessions Di Desa Kebundalem Lor, Prambanan, Klaten (Studi Survei Di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Prambanan)*, Skripsi, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikanuniversitas Negeri Yogyakarta.

[14]Ayu Tifani Kartika Putri, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Studi Pada Kegaiatan Family Devlopment Sessionss Di Desa Manduro Manggunggajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto*. Jurnal . Jurusan Ilmu Admisnistrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum.Universitas Negeri Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan FDS. Pada Tahap Penyadaran dan pembentukan perilaku, di Desa Manduro, sudah dilakukan dengan baik. Selain modul pembelajaran dan juga sarana pelengkapnya, pendamping juga berinovasi untuk dapat meningkatkan ketertarikan peserta terhadap program pelatihan. Pada Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, para RTSM pada awalnya sulit untuk datang dalam pertemuan, namun kini sudah terlihat kemajuan dengan semakin menurunnya jumlah peserta tidak hadir dalam pertemuan, menyadari pentingnya pendidikan dini bagi anaknya. Sikap dan perlakuan yang diberikan kepada anaknya pun berbeda, mereka jadi lebih perhatian dan lebih sering memuji ketika anak berbuat baik. Kebiasaan baik yang dipraktekkan para peserta juga terlihat dari tingkat kesehatan keluarga, ibu dan anak, yang semakin baik. Para ibu peserta juga lebih mengutamakan dalam memberikan pertolongan untuk yang sakit ke Puskesmas terdekat. Kini, mereka juga sudah mampu membuat catatan kas, walapun masih dalam lingkup keluarganya sendiri. Pada Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, para peserta FDS antusias dalam menjawab soal-soal yang di berikan, kemampuan "Calistung" meningkat. Beberapa RTSM bahkan sudah mencoba menularkan ilmu yang didapat dari pelatihan kepada keluarga lainnya. Dari banyak hasil positif dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan, masih ada kekurangan yang menjadi catatan, yaitu kurangnya sarana penunjang dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan FDS di Desa Manduro Manggunggajah sudah baik, hanya kurang optimal. Penulis bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan saran, sebaiknya pelaksanaan FDS dilaksanakan bersamaan dengan program PKH dimulai, jumlah pendamping ditambah, sarana penunjan kegiatan harus mendapat dukungan lebih baik lagi, serta perlu diberikan dukungan finansial dari Pemda setempat.

Ketiga, Respon Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program *Family Development Sessions* (FDS) Di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas. Yang disusun oleh Andrena Simanjuntak NIM 120902057 Jurusan Departemen Ilmu Kesejahteraan SosialFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2016. [15] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat dalam pelaksanaan program *Family Development Sessions* (FDS) di kelurahan Timbang Deli kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskripstif, dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat dalam pelaksanaan program *Family Development Sessions* (FDS) di kelurahan Timbang Deli kecamatan Medan Amplas adalah positif dengan nilai rata-rata 0,76. Hal ini terbukti dari jawaban-jawaban responden yang dibagi dalam 3 indikator, yaitu respon kognitif, afektif dan afektif dengan hasil kognitif (0,69), afektif (0,95) dan konatif (0,66).

[15]Andrena Simanjuntak, 2016, *Respon Masyarakat Dalam Pelaksanaan Progam Family Development Sesion (FDS) di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas.*Skripsi Jurusan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu strategi yang biasa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan kemuadian menganalisa data yang diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti . Penggunaan metode penelitian yang sesuai akan memudahkan peneliti untuk mengkaji suatu masalah yang diteliti.

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini berupaya menjelaskan dan mendiskripsikan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo dan proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian Kualitatif adalah penilitian yang bersifat dan memiliki karakteristik,[16] bahwa dasarnya menyatakan dalam keadaan sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah bentuk simbol-simbol atau bilangan.[17]

Adapun jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

[16] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,(Bandung: CV ALFABETA, 2013), 173.
[17] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[18]

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo dan Bagaimana proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo.

. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini, maka penulis akan menggambarkan tentang " PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGAM *FAMILY DEVELOPMENT SESSIONS* (FDS) Di Dusun Krajan Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian di teliti dan dianalisis. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Dusun Krajan Desa Campurejo. Peneliti tertarik dengan Dusun ini karena tingkat kemiskinan masyarakat masih sangat tinggi dan masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan serta besarnya pendudukan yang memadati Dusun Krajan. Waktu penelitian ini adalah dari tanggal 1 mei sampai 30 juli 2019.

[18] Ibid,., 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data.

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sumbernya atau pihak-pihak yang berwenang terhadap masalah yang hendak dibahas,[19] dalam hal ini adalah UPPKH Kabupaten Gresik. UPPKH Kecamatan Panceng. Kordinator Kecamatan Pendamping PKH Panceng, Pendamping Dusun Krajan Desa Campurejo, Aparatur Desa bagian Kesra dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

b. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data-data kepustakaan yang relevan dengan penelitian.[20] Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan atau dokumentasi lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Pedoman Umum PKH Tahun 2017, Pedoman Umum PKH Tahnun 2018 serta Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, Data Demografi Desa Campurejo, Data KPM Kecamatan Panceng dan Data KPM Desa Campurejo

4. Teknik Pengumpulan Data.

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[19] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,(Bandung: CV ALFABETA, 2013), 176
[20] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara.

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.[21]

Penulis mewawancarai *pertama*, pendamping Desa Campurejo Dusun Krajan Bapak yaitu Jumanan S.E dan pendamping Dusun Karang Tumpuk dan Sidorejo Ibu Uswatun Hasanah. *Kedua*,.aparatur Desa bagian Kesra yaitu Bapak Moh. Syuhudi *ketiga*, ketua kelompok 1 yaitu Ibu Qomiyatin *keempat*, Keluarga Penerima Manfaat yaitu, Ibu Inayah dan Ibu Nur Hayati.

b. Metode Observasi.

Metode observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung di tempat tersebut.[22] Penulis melakukan observasi dengan terjun langsung ke Desa Campurejo untuk melihat pelaksanaan Progam *Family Development Sessions* (FDS). Sehingga penulis bisa mendapatkan data yang dibutuhkan. Penulis mendatangi dan

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi "mixed Methode"* (Bandung: Alfabeta, 2011), *224*
[22] Ibid,. *226*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkunjung ke informan satu per satu yang akan diberikan pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh Penulis.

c. Dokumentasi.

Mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku,surat kabar.

5. Tehnik Pemilihan Informan.

Pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berdasar anggapan tentang informan yang dinilai paling tahu tentang data yang diharapkan atau informan sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasisosial yang diteliti.[23]

6. Tehnik Analisis Data.

Teknik Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Nasution 1992 dan Melong 1991, data yang diperoleh selama pengumpulan data dilapangan, dan di lakukan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi merduksi data, menyajikan data display data melaksanakan verifikasi.[24]

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak sehingga perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penulis

[23]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,(Bandung: CV ALFABETA, 2013), 218

[24] Suharsaputra, Uhar, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: PT Refika Aditama), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turun ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit sehingga perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian terlihat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.[25]

Penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merancanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami. Namun dalam fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga data juga mengalami perkembangan.[26]

Verifikasi atau penarikan kesimpulan yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah

[25] Suharsaputra, Uhar, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: PT Refika Aditama), 217
[26] Ibid,. 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada. Temuan dapat berupa diskripsi gambaran suatu objek yang masih remang-remang atau tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[27]

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif, data yang dianalisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut diinterpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan.

G. Fokus Penelitian.

Dikarenakan Progam Keluarga Harapan adalah progam yang diperuntukan untuk masyarakat miskin yang terdaftar dalam dan Data Terpadu Progam Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, maka fokus masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang menerima bantuan PKH yang kemudian disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan progam, khususnya Progam *Family Development Sessions* (FDS) seperti pelaksana progam, dalam hal ini adalah pendamping PKH Dusun Krajan Desa Campurejo, Apartur Desa khususnya bagian Kesra dan tokoh masyarakat yang mempunyai informasi mendalam maupun fasilitator yang pernah memberikan materi maupun ilmu dan pengalamanya.

Sedangkan progam *Family Development sessions* (FDS) merupakan progam yang termasuk dalam progam yang perencanaannya dari atas ke bawah

[27] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,(Bandung: CV ALFABETA, 2013), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Top-Down Planning)*, yaitu bahwa proses perencanaan progam *Family development Sessions* (FDS) dari Kementrian Sosial dan UPPKH Pusat. Tetapi dalam pelaksanaanya dari bawah, yaitu bahwa pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) dilakukan berdasarkan komitmen masyarakat dalam hal ini adalah KPM,.

Maka fokus dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *family development sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo dan Bagaimana proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk menghindari ketidak beraturan pembahasan dalam penelitian ini, dan demi fokusnya pemikiran serta pemecahan pokok permasalahan agar lebih teratur, hasil penelitian disusun dalam suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini diuaraikan menjadi beberapa bab dan sub bab yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain untuk memudahkan penulisan serta memudahkan pembaca untuk memahami secara runtut. Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, antara lain:

BAB I : Berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dan pengantar pembahasan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneiltian, manfaat penelitan, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II	:	Berisi landasan teori. Dalam bab ini terdiri atas kerangka konseptual dan kajian teori yang akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori partisipasi masyarakat dan kebijakan publik.
BAB III	:	Berisi setting penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan Progam *Family Development Sessions* (FDS) atau P2K2. Dari gambaran umum tersebut kemudian dapat digunakan untuk gambaran umum dalam menganalisa temuan.
BAB IV	:	Berisi penyajian dan analisis data, yang didalamnya meliputi deskripsi temuan di lapangan, serta pembahasan yang berisi tentang analisis data mengenai temuan dan teori.
BAB V	:	Berisi bab penutup, yang didalamnya meliputi kesimpulan dan rekomendasi atau saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat.

1. Pengertian Partisipasi.

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa inggris *"participation"* yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yangmemungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengar, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.[28]

Pengertian partisipasi secara formal adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pengambilan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksakan tanggung jawab untuk melakukanya.[29]Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Keith Davis, bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan

[28] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pers, 2014), 141
[29] Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, batasan dari partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam penggambilan keputusan atau pelaksanaanya terhadap proyek-proyek pembangunan .[30]

Dari beberapa definisi diatas, maka partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan, keikutsertaan dalam suatu kegiatan sehingga dapat diambil manfaatnya sebagai motivasi dalam usaha mencapai tujuan bersama serta dapat juga partisipasi diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap progam sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan individu.

2. Pengertian Masyarakat.

Menurut Poerwadarminto, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antar lain lingkungan sosial.[31]

Selain itu, definisi masyarakat dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 dijabarkan sebagai kelompok warga negar indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidangnya. Adapun istilah

[30] Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 30-31
[31]Ibid., 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat menurut Purwanto merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok, lembaga atau organisasi yang berada diluar lingkungan.[32]

Jadi masyarakat itu merupakan sekumpulan dari sejumlah individu dalam suatu tempat tertentu yang menunjukan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial.

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat.

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut bintor, adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan progam pembangunan. Sedangkan menurut Eko, partisipasi masyarakat diartikan sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memilih hak sipil, politik dan sosial ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga diartikan keikutsertaan masyarakat baik secara aktif maupun pasif dalam meningkatkan mutu berupa pikiran, tenaga, dnan serta mempunyai rasa tanggung jawab guna mencapai tujuan.[33]

Adisasmita, mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan

[32] Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 32
[33] Ibid., 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

progam/proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal". Undang-undang no 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat itu merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.[34]

Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepaskan dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemumakan oleh Saboff dalam Adiyoso, bahwa "tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan". Kemudian untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka pelaksanaanya harus didasarkan pada konstek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.[35]

Secara teoritis partisipasi masyarakat ini memang mudah sekali untuk dibicarakan. Namun dalam praktek pelaksanaanya seringkali terjadi manipulasi dan rekayasa. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik secara internal (yaitu: motivasi, pengetahuan, pengalaman individu dan sebagainya) maupun eksternal (yaitu: peran *stakeholders*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya).

---

[34] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pers, 2014), 141
[35] Ibid,. 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan tidak sedikit proyek-proyek pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi, namun dalam pelaksanaanya bukan partisipasi tetapi mobilisasi dan prosesnya bukan *bottom up* tetapi *top down*.[36]

b. Bentuk partisipasi masyarakat.

Di negara-negara maju, terutama yang menganut sistem desentralisasi, partisipasi masyarakat dikreasikan dan dipertahankan oleh masyarakat. Kesadaran mereka sebagai pemilik dan penanggung jawab sudah sangat tinggi, sedangkan dinegara yang sedang berkembang masyarakat masih sangat menggantungkan kepada pemerintah, padahal pemerintah sendiri sangat kekurangan dana untuk hal tersebut.[37]

Menurut Cohen dan Uphoff, bentuk partispasi dibedakan menjadi 4, yaitu :

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

[36] Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 143
[37] ibid,. 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

c) Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

d) Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.[38]

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.

Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Adanya kesadaran tersebut dapat

[38] Siti Irene, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 61-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh beberapa faktor. Jika ditinjau dari segi motivasinya, faktor tumbuhnya partisipasi masyarakat adalah:[39]

a) Takut atau terpaksa.

b) Ikut-ikutan.

c) Kesadaran.

Dari beberapa literatur didapatkan bahwa umumnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal.

a) Faktor internal, yaitu mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan atau aktivitas.

b) Faktor eksternal adalah semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut, antara lain pengurus Desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, NGO, pihak ketiga (LSM, Yayasan sosial, Perguruan Tinggi).[40]

Partisipasi masyarakat ternyata dapat berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

---

[39] Khairuddin H., *Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 126.

[40] Siti Robiah Nurbaiti dan Azis Nur Bambang, "*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*", jurnal sosial Volume 14, Nomor 1 (Oktober 2017), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

b) Adanya kemauan untuk berpartisipasi .

c) Adanya kemampuan untuk berpartisipasi.

B. Partisipasi Politik.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupanya.[41]

1. Konsep Partisipasi politik

Berikut dikemukakan sejumlah konsep partisipasi politik. *Pertama*, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. *Kedua*, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan. Termasuk kedalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana kebijakan publik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat

[41] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah. *Ketiga,* kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. *Keempat,* kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dapat dilakukan langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. *Kelima,* kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tak berupa kekerasan (Nonviolence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umu,m mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang tak wajar (Tak *konvensional*) dan berupa kekerasan *(violence*), seperti *demonstrasi* (unjuk rasa), masyarakat pembangkang halus (seperti memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), hura-hura, mogok, pembangkan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.[42]

2. Tipologi Partisipasi Politik.

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah,

[42] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 141-142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.[43]

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output.* Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan kelompok disebut apatis atau golongan putih (Golput).[44]

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataanya persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik.[45]

---

[43] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 142
[44] Ibid,., 142-143
[45] Ibid,. , 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah 9sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?[46]

Berdasarkan tinggi-rendahnya kedua faktor tersebut, Paige membagi partisipasi menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).[47]

---

[46] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 144
[47] Ibid,. ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua faktor di atas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalamn berorganisasi. Yang dimaksud status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran ataupun kepemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.[48]

Hubungan faktor-faktor tersebut digambarkan sebagai berikut, status soial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi dikelompokkan sebagai variabel pengaruh atau variabel independen. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah dikategorikan sebagai variabel antara atau *interventing variables.* Lalu, partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.[49]

[48] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 144-145
[49] Ibid,. , 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kebijakan Publik.

1. Kebijakan publik menurut para ahli.

Menurut david Easton, "*public policy is the authoritative allocation of value for the society* ." kebijakan pubik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/kepada seluruh masyarakat". Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton, merupakan alokasi nilai-nilai yang otoriatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritas untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil dari nilai-nilai tersebut.[50]

Menurut Carl J. Frederick, " *public policy is a proposed course of action of a person, group or government whitin a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose*". Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.[51]

---

[50] Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Admisnistrasi Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan* (Yogyakarta : Calpulis, 2016), xvii

[51] Ibid. , xvi- xvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut James E. Anderson, " *public policy are those policies developed by governmental bodies and officials*". Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini cenderung mengacu pada persoalan teknis dan administrative saja. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunya tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan public antara lain mencakup:

a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
d. Kebijakan bersifat positif (merupakan tindakan pemrintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat *negative* (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).[52]

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam rangka untuk

[52]Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Public Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Admisnistrasi Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan* (Yogyakarta : Calpulis, 2016), xvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik kebijakan public haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandate dari publik atau orang banyak, umumnya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Focus utama kebijakan publik dalam Negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran Negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan public dengan hak menarik pajak dan retribusi dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagi kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.[53]

Kebijakan memang menjadi ranah yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga, tak heran jika Carl Frierich pun mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan

[53] Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Public Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Admisnistrasi Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan* (Yogyakarta : Calpulis, 2016), xviii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.[54]

2. Proses Kebijakan Publik

Sebuah kamus umum mendifinisikan proses sebagai " sebuah serangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan". Proses tak pelak lagi dikaitkan dengan segala tindak tanduk sosial. Para cendikiawan politik mempunyai minat tradisional terhadap proses-proses institusional, yaitu " rangkaian tindakan atau operasi" yang dikaitkan dengan para pembuat undang-undang (*legislatures*), para eksekutif, birokrasi, pengadilan, parpol dan lembaga-lembaga politik lainya.[55]

Adapun proses kebijakan menurut Charles O. Jones dapat diuraiakan sebagai berikut:

a. Mengajukan permasalah ke pemerintahan.

Bab ini memfokuskan pada proses-proses kompleks dan arbiter yang menetukan apakah sebuah isu dapat dibawa ke pemerintah. Di sini perhatian dipusatkan pada aktivitas-aktivitas biasa tertentu yang secara normal dikaitkan dengan tahap awal proses kebijakan. Karena itu penyusunan agenda diuji untuk memberikan detail terinci yang dapat mencakupi analisis berbagai perspektif terhadap peran pemerintah dalam kegiatan penting ini. Dan pembicaraan mengenai hal ini jugaakan dilampirioleh beberapa studi kasus.

---

[54]Dwiyanto indiahono, *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analisis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 18

[55] Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, terj.Ricky Istamto (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memformulasikan usulan.

Pembuat keputusan harus mengidentifikasi dan memformulasi masalah mereka. Mereka harus membuat pilihan sebelum dapat memutuskan keputusan tindakan yang tepat. Semacam proses tingkat dua dari definisi masalah yang dikerjakan petugas yang pekerjaanya adalah untuk memberi petunjuk pengalokasian sumber-sumber pemerintah. Mereka harus melihat kembali pada peristiwa dan masalah yang ditimbulkanya dan segera pada pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Bersamaan dengan semua kativitas fungsional yang didiskusikan, formulasi mempunyai peralatan untuk gerak maju dan mundurnya.

c. Melegimitasi Progam.

Legimitasi harus dimulai dengan suatu standar mengenai tatacara *(means)*. Dalam sebuah sistem politik yang mapan hal persetujuan dan kewenangan ini dapat bersifat sudah ada dengan sendirinya (*taken of granted*). Dan setiap pemerintahan agaknya mendambakan kestabilan semacam ini. Deperti yang digambarkan dalam bab pertama bahwa keseimbangan sisitem politik amerika telah beberapa kali mengalami cobaan berat, termasuk cobaan yang tertuju pada cara-cara mendasar mengenai bagaimana cara pengesahan suatu progam. Jadi topik pertama yang akan dibahasa adalah penekanan dukungan pada institusi-institusi politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penganggaran progam.

Proses penganggaran (*budgetary process*) mungkindapat menjadi sebuah gambaran paling baik mengenai hal ini. Sangat tidak memadai apabila kita hanya memiliki gagasan yang baik, dan ingin mengatasi sebuah permasalahan publik ataupu ingin mencari dukungan bagi gagasan termaksud.

e. Penerapan progam.

Bardach melukiskan kesulitan-kesulitan dalam mencapai kesepakatan didalam proses kebijakan dan penerapan kesepakatan tersebut. Hal ini terlihat pada pelaksanaan kerja serta pemindahan dari tujuan yang disepakati ke proses pencapaian tujuan.

Dengan demikian penciptaan suatu progam itu sendiri telah menjadi suatu peristiwa yang merangsang timbulnya proses kebijakan mini. Permasalahanya mungkin harus didefinisikan, pendapat harus diutarakan dan persetujuan harus dicapai. Tetapi kita tidak perlu bingung dengan kerangka konseptual atau kerangka analitis tentang apa yang terjadi dalam kehidupan politik yang nyata.

f. Mengevalusi progam.

Arti evaluasi diungkap dari cara ia dikategorikan dalam pemerintahan, yaitu “progam kepada pemerintah”. Menurut Carol H. Weiss mengamati : evaluasi adalah sebuah kata elastis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan dari kata tersebut dalam arti umum adaah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamati dan meneliti suatu fenomena (seseorang, sebuah benda maupun suatu gagasan) berdasarkan beberapa ukuran yang eksplesit dan implisit.[56]

3. **Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.**

Ada dua hal yang perlu duperhatikan dalam mengkaji pemaknaan partisipasi masyarakat. Pemaknaan pertama, partisipasi masyarakat sebagai tujuan. Menurut Suci Handayani, partisipasi semacam ini akan membelenggu, mendistorsi dan menghilangkan hak warga negara untuk terlibat pro-aktif dalam setiap kebijakan yang diambil. Pemaknaan kedua, partisipasi dimaknai sebagi alat. Pemaknaan tersebut menurut Suci Handayani mengandung maksud bahwa setiap tindakan partisipasi menjadi sebuah keniscayaan. Pemaknaan pertama hanya menekankan pada aspek partisipasi formal atas rakyat, sedangkan makna kedua mengandung maksud keterlibatan masyarakat harus pro-aktif.[57]

Definisi partisipasi menurut Davis "*as the mental an emotional involment of a person in a gggroup situation that encourages the indiviusal to contribute to group goals and to sahre responibility for them.*" Partisipasi dimaksud menurut Owens meliputi energi mental serta emosi, kreatifitas, dan berbagai tanggung jawab. Pernyataan yang lebih fokus dinyatakan Arimbi H.P dan Mas Achmad Santoso, bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu cara melakukan interaksi kelompok non-elit dan elite pengambilan keputusan.

---

[56] Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, terj.Ricky Istamto (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 53

[57] Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok non-elite adalah kelompok yang selama ini tidask diikutsertakan dalam proses poengambilan keputusan dan kelompok elite adalah kelompok yang selam ini melakukan pengambilan keputusan.[58]

Partisipasi dikaitan dengan dunia politik. Menurut Hungtington, berkaitan dengan aspek kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat publik atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Sedangkan, kegiatan yang tercakup dalam partisipasi menurut Uphoff dan Cohen meliputi membuat keputusan, pelaksanaan, memperoleh hasil (keuntungan), dan penilaian terhadap seluruh kegiatan. Gould mengatakan bahwa wilayah partisipasi pembuatan kebijakan meliputi penentuan bersama dan cara-cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.[59]

Pemaknaan-pemaknaan diatas mengandung pengertian bahwa partisipasi masyarakat mensyaratkan beberapa hal berikut ini.

a. Kesadaran penuh kelompok elite atas interkasinya dengan kelompok non-elite.
b. kelompok non-elite tidak merasa interaksinya dengan kelompok elite sebagai sebuah bentuk “belas kasihan”.
c. Interaksi yang ada menjadikan kedua kelompok berpartisipasi aktif.

[58] Ibiid.,hal 28-29
[59] Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Partisipasinya berawal dari penentuan tujuan bersama dan cara-cara mewujudkanya, pelaksanaan, memperoleh hasil (keuntungan), serta penilaian terhadap seluruh kegiatan atau progam.

Pendapat yang sama disampaikan *The Nation Standard for Civics and Government*, bahwa warga negara harus memiliki dua kecakapan utama, yaitu kecakapan intelektual dan kecakapan partisispatoris. Kecakapan intelektual meliputi kemampuan mengidentifikasi, mendiskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi posisi, mengambil sikap/posisi, dan membela posisi. Sedangkan, kecakapan partisipatoris meliputi kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan kepeutusan dengan bekerja sama dengan yang lain, memaparkan dengan gamblang suatu masalah ynag penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan, membangun koalisi, negoisasi kompromi dan mencari konsensus, serta mengelola konfilk.

Partisipasi menurut Meriam Budiharjo, bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif tau tidak efektif. Namun dari paparan diatas, partisipasi secara kolektif merupakan hal yang penting karena itu diperlukan aliansi untuk melakukan agregasi kepentingan individu.[60].

[60] Ibid,.hal, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Progam *Family Development Sessions* (FDS).

Menurut Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Pengertian Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Sessions* (FDS) merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan.[61]

Tujuan dari FDS adalah:

1. Meningkatkan Pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
2. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.
3. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejateraan keluarga.
4. Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
5. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
6. Memberikan pemahaman kepada peserta untuk menemukan potensi lokal agar dapat dikembangkan secara ekonomi.[62]

[61]Pedoman PKH tahun 2017, 25
[62]Pedoman Umum Progam Keluarga Harapan Tahun 2016, 23-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan FDS adalah kegiatan pembelajaran dengan berbagai materi praktis, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Masing-masing materi terangkum dalam suatu modul dengan berbagai sesi yang berurutan. Modul FDS dikembangkan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat. Pendamping PKH harus mengikuti diklat FDS terlebih dahulu. Kegiatan FDS adalah kegiatan belajar bagi peserta PKH yang akan mendorong terciptanya masyarakat yang gemar belajar.[63]

Menurut buku pedoman umum PKH 2018, pelaksanaan P2K2 atau *Family Development Sessions* (FDS) mempunyai kriteria tempat pelaksanaan FDS sebagai berikut:

1. Dapat dijangkau dengan mudah oleh peserta.
2. Memadai untuk menampung semua peserta.
3. Memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran.
4. Tidak berlokasi di dekat keramaian yang mengganggu pertemuan (jalan, pasar, sekolah).
5. Diselenggarakan di waktu yang disepakati oleh peserta dan pendamping.
6. P2K2 dapat dilaksanakan di tempat fasilitas umum seperti ruang pertemuan aula kelurahan, rumah peserta, sekolah, dll dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.[64]

Sedangkan waktu dan ketentuan pelaksanaan P2K2 atau FDS adalah sebagai berikut:

---

[63] https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan/family-development-session, diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 11:30 WIB
[64] Pedoman Umum PKH 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertemuan P2K2 diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan.
2. 1 sesi disampaikan dalam 1 kali pertemuan.
3. Penentuan sesi disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi KPM.
4. Penyampaian sesi P2K2 berlangsung sesuai panduan dalam modul maksimal 120 menit.
5. Waktu penyelenggaraan P2K2 dapat ditentukan sesuai kesepakatan antara peserta PKH dan Pendamping.
6. Modul P2K2 saat ini terdiri dari 14 Sesi, jika 14 sesi sudah disampaikan, Pendamping harus mengulangi kembali pemberian materi untuk mengingatkan KPM.[65]

Untuk peserta P2K2 adalah seluruh KPM PKH yang telah ditetapkan. Dan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, jumlah peserta yang menghadiri P2K2 tidak kurang dari 30 orang. Jumlah peserta disesuaikan dengan sesi/materi P2K2. Sementara Fasilitator/Narasumber P2K2 meliputi Pendamping, Peksos Supervisor, atau pihak lain yang sesuai dengan sesi/materi yang dibahas.[66]

Adapun alat bantu ajar dalam P2K2 atau FDS adalah sebagai berikut:

1. Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2 adalah: Modul bagi Pendamping, Buku Pintar, Brosur, Poster, Flipchart, Film, Alat permainan (kartu, papan permainan).

[65] Pedoman Umum PKH Tahun 2018
[66] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peralatan Audio Visual pendukung berupa laptop, speaker, TV, DVD Player (jika ada) dan alat tulis.

Untuk tahun 2018, FDS PKH mempunyai 2 sumber bahan ajar. Yaitu modul dan buku pintar. Materi FDS PKH terdiri dari 5 modul dan 5 buku pintar yang mencangkupi topik pendidikan dan pengasuhan anak, ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, perlindungan anak dan kesejahteraan social disabilitas dan lansia. Adapun materi-materi progam FDS adalah sebagai berikut[67]:

1. Modul pendidikan dan pengasuhan anak.

   Modul ini terdiri dari 4 sesi materi dengan rician sebagai berikut:

   a. menjadi orang tua yang lebih baik.

   b. memahami perkembangan dan perilaku anak.

   c. memahami cara anak usia dini belajar.

   d. membantu anak sukses sekolah.

2. Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.

   Modul ini terdiri dari 3 sesi materi dengan rincian sebagai berikut:

   a. mengelola keuangan keluarga.

   b. cermat meminjam dan menabung.

   c. memulai usaha.

3. Modul kesehatan dan gizi.

   a. pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil.

   b. pentingnya gizi untuk ibu menyusui.

[67] https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dokumen, diakses pada pukul 20 : 30 WIB Tanggal 20 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan.

4. Modul perlindungan anak.

   Modul ini terdiri dari 2 sesi materi dengan rincian sebagai berikut:

   a. upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak.

   b. penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.

5. Modul kesejahteraan social disabilitas dan lansia.

   a. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat.

   b. Pentingnya kesejahteraan lansia.

Sedangkan buku pintar berisi tentang pengetahuan dan panduan praktik seputar 5 topik diatas yang menjadi komponen PKH. Buku pintar digunakan sebagai pengantar dan bahan bacaan untuk pendamping maupun KPM. Adapun isi dari 5 buku pintar tersebut, yaitu :

1. Buku pintar pengasuhan dan pendidikan anak.

   Adapun isi dari buku pintar pengasuhan dan pendidikan anak sebagai berikut:

   a. Panduan praktik di rumah.

   b. Panduan praktik dalam pertemuan.

2. Buku pintar pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.

   a. Pintar latihan di rumah.

   b. Pintar latihan bersama.

3. Buku pintar kesehatan dan gizi.

   a. Kesehatan ibu.

   b. Kesehatan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Buku pintar perlindungan anak.
    a. Pencegahan kekerasan terhadapo anak.
    b. Pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak.
5. Buku pinter kesejahteraan social disabilitas dan lansia.
    a. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat.
    b. Perlindungan terhadap lanjut usia.

Didalam progam *Family Development Session* (FDS) terdapat pelaporan yang dilakukan oleh pendamping PKH sebagai kewajiban dalam pendampingan masyarakat. Adapun alur dari pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendamping membuat rencana pelaksanaan progam P2K2, mengisi form P2K2.01, mengisi daftar hadir form P2K2.01A dan dilampirkan pada laporan bulanan yang kemudian diberikan ke dinas social dan pekerja social supervisor Kabupaten/Kota.
2. Dinas sosial dan pekerja Sosial merekapitulasi P2K2.01 pendamping dan mengisi form P2K2.2 kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi dan Kordinator PKH Tingkat Wilayah.
3. Dinas Sosial Provinsi dan Korwil PKH merekapitulasi P2K2.2 dan mengisi form P2K2.3 dan melaporkan ke Kordinator PKH Pusat dan Dirjen Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
4. Korpus PKH dan Dirjen JSK kemudian merekapitulasi seluruh provinsi.[68]

[68] Pedoman Umum PKH Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Profil Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

1. Deskripsi Dusun Krajan.

Lokasi penelitian yang penulis jadikan sebagai obyek kajian untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat melalui kegiatan *Family Development Sessions* di Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Gresik. Dusun Krajan merupakan suatu dusun yang berada di ujung Utara Desa Campurejo. Yang langsung bersebelahan denagn Desa Waru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Alasan peneliti memilih Dusun Krajan sebagai Lokasi penelitian adalah Desa Campurejo merupakan desa yang padat dengan perokonomian yang menengah kebawah. Desa Campurejo merupakan Desa terpadat di kecamatan panceng. Untuk itu menarik diteliti bentuk partisipasi masyarakat dalam progam keluarga harapan, terlebih lagi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *Family Development Sessions* yang dilaksanakan di Desa Campurejo khususnya Dusun Krajan.

Dusun Krajan atau biasa disebut masyarakat Desa Campurejo dengan sebutan "*Camplong"* dikarenakan terdapat sebuah pasar tradisonal lokal yang terbilang cukup besar dan terkenal di Kecamatan Panceng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara administratif, Dusun Krajan merupakan salah satu Dusun yang ada di Desa Campurejo. Dusun krajan adalah sentral atau pusat dari Pemerintahan Desa Campurejo. Namun secara struktural Dusun Krajan Tidak termasuk dalam Struktur Dusun yang ada di Desa Campurejo.

Dusun Krajan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Campurejo. Asal usul nama Krajan berasal dari kata Kerajaan, yaitu sebuah pusat wilayah yang memimpin wilayah lainya.

a) Peta Dusun Krajan.

Peta Dusun Krajan[69]

Gambar 3.1

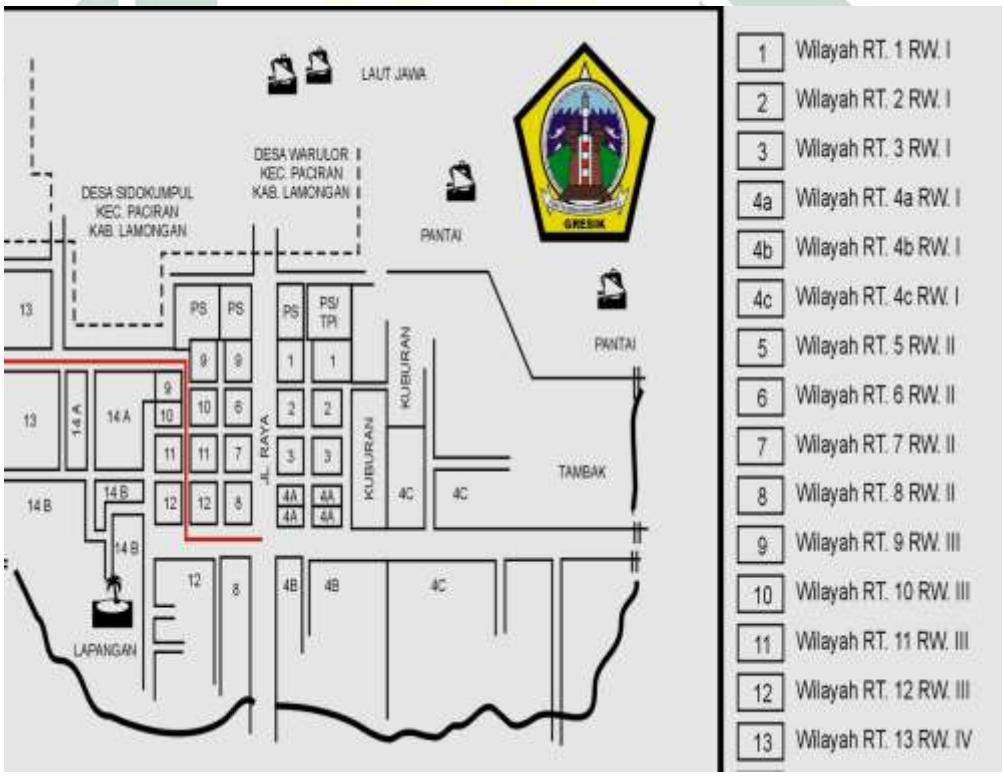

Sumber : pemerintah Desa Campurejo tahun 2018.

[69] Data demografi Desa Campurejo tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Batas wilayah.[70]

Tabel 3.1

Batas Wilayah.

BATAS DUSUN	
Sebelah Utara	: Desa Warulor Kec. Paciran
Sebelah Selatan	: Desa Banyutengah, Desa Ketanen, Desa Prupuh
Sebelah Timur	: Desa Dalegan Kec. Panceng
Sebelah Barat	: Dusun Karang Tumpuk

Sumber : Pemerintah Desa Campurejo Tahun 2018

c) Kependudukan.

Penduduk Dusun Krajan dapat dikatakan sangat besar, karena Dusun Krajan merupakan salah satu Dusun yang memiliki wilayah yang cukup luas. Dusun krajan merupakan Dusun terpadat di Desa Campurejo. Penduduk Dusun Krajan Berjumlah : 5.301 Jiwa, yang terdiri dari 2.318 laki-laki dan 2.983 perempuan. Dan sekitar 1.128 keluarga.[71]

B. Kegiatan Progam Keluarga Harapan di Dusun Krajan Desa Campurejo.

Adapun kegiatan Progam keluarga Harapan di Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan panceng Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

[70] Data demografi Desa Campurejo tahun 2018
[71] Data demografi Desa Campurejo tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertemuan Awal dan Validasi.

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (*eligible)*.[72]

Kegiatan validasi dapat dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi.[73]

Kegiatan pertemuan awal dan validasi data di Dusun Krajan Desa Campurejo dilakukan di balai Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan dan mengundang calon KPM untuk melakukan sosialisasi, validasi data dan pemahaman, pengetahuan dan Tujuan PKH. Sedangkan bagi calon KPM yang berhalangan hadir dapat menghubungi Pemerintah Desa maupun Ketua Kelompok KPM yang telah terbentuk untuk melaksanakan validasi data. Biasanya calon KPM menghubungi Pendamping PKH untuk melaksanakan validasi data.

[72] Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, 39
[73] Ibid,., 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan diberikan kepada KPM yang memiliki komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap, yang dapat disalurkan sekaligus dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai dan disalurkan per tahap dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dengan mekanisme tunai.[74]

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan (*eligible*), memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.[75]

Untuk penyaluran bantuan PKH dalam bentuk non tunai yang meliputi komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dan lansia di Dusun Krajan dilakukan dengan mandiri oleh masyarakat. Tanggal penyaluran bantuan biasanya tgl 3-15 awal bulan dan transaksi dilakukan di toko atau market yang menyediakan ATM Bank Himbara.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan tunai yang meliputi bantuan pangan dalam bentuk saldo yang hanya dapat dicairkan dengan bahan pokok seperti beras, telur dan minyak di Dusun Krajan Desa Campurejo melalui

[74] Pedoman Umum PKH Tahun 2017
[75] Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

3. Verifikasi Data.

Sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksana PKH harus memastikan KPM terdaftar dan hadir pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota KPM PKH pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan dan pendidikan.[76]

Pelaksanaan verifikasi komitmen menggunakan formulir verifikasi yang disampaikan pendamping kepada petugas layanan kesehatan dan pendidikan untuk diisikan data anggota KPM yang tidak hadir setiap bulannya. Formulir verifikasi tingkat kehadiran yang telah diisi oleh petugas faskes dan fasdik, kemudian diinput/entri dalam aplikasi PKH. Hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan pada setiap tahap penyaluran.[77]

[76] Pedoman Umum PKH Tahun 2017
[77] Pedoman Umum PKH Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemutakhiran Data.

Maksud dan Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut: *pertama,* Perubahan status *eligibilitas* KPM. *Kedua,* Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan. *Ketiga,* Perubahan komponen kepesertaan. *Keempat,* Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses. *Kelima,* Perubahan fasilitas Pendidikan yang diakses. *Keenam,* Perubahan domisili KPM. *Ketujuh,* Perubahan data bantuan program komplementer.[78]

Pelaksanaan pemutahiran data menggunakan aplikasi mobile yang digunakan oleh pendamping untuk mencatat kondisi terkini pada setiap kunjungan ke KPM PKH.

Di Dusun Krajan Desa Campurejo dalam melaksanakan pemutakhiran data dilakukan dengan cara pendamping mengordinir ketua kelompok untuk mengumpulkan anggota KPM di suatu tempat tergantung keputusan bersama dengan kemudian membawa data seperti KK, KTP Ijazah dan lain sebagainya untuk kemudian dilakukan pemutakhiran data. Untuk bulan juli 2019, pendamping sedang melakukan Pemutakhiran data dengan menggunakan Sistem Online atau melalui E-PKH. Tetapi

[78] Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya pendamping menggunakan cara manual, yaitu dengan merekap data melalui format file yang telah tersedia oleh UPPKH Kabupaten.

5. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Sessions (FDS).

Dalam rangka perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.[79]

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH terhadap kelompok-kelompok dampingannya.[80]

6. KUBe Beras.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Kecamatan Panceng adalah Kecamatan yang tidak mendapat atau mempunyai kuota Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dalam bantuan PKH. Hal ini menurut Kordinator Pendamping Kecamatan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Menurutnya mereka telah

[79] Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, 44
[80] Ibid,.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan dan meminta tentang anggaran atau proposal tentang KUBe PKH untuk Kecamatan panceng tetapi tidak terealisasi hingga sekarang.

Namun ada suatu inisiatif dari pendamping Dusun Krajan Desa Campurejo untuk mendirikan sebuah usaha yang mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Dusun Krajan Desa Campurejo, yaitu KUBe Beras Mandiri.

Tahun 2018, KUBe Beras diberikan kepada KPM yang bersedia menjalankan jual beli beras. Sumber dana KUBe ini berasal dari dana pribadi Pendamping PKH Dusun Krajan yaitu Bapak Jumanan, SE. Beliau membeli dari pabrik pengolahan beras petani Desa Lowayu yang mempunyai harga 25.000 yang mampu bersaing dengan Hraga beras premium dipasaran. Dengan harga 28.000 rupiah, beras tersebut diperjual belikan kepada KPM yang lain maupun masyarakat sekitar. Sehingga laba 3000 rupiah sebagai keuntungan KPM yang memperjual belikan beras tersebut.

Tujuan dari KUBe ini adalah untuk dapat memperdayakan KPM dalam ekonomi. Serta dengan adanya progam ini, harapan dari pendamping dapat menyantuni anak yatim, Bansos dan lain sebagainya dengan menngunakan hasil dari KUBe ini. Tetapi sampai saat ini belum terealisasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Progam *Family Development Sessions* (FDS) dalam Progam Keluarga Harapan (PKH) Di Dusun Krajan Desa Campurejo.

Progam *Family Development Sessions* (FDS) adalah Proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM. FDS bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan bagi keluarga serta kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas. Dengan harapan, setelah memperoleh FDS dapat merubah pola kehidupan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan produktifitas sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

Maka pemenuhan kewajiban oleh Peserta PKH tidak semata didorong oleh bantuan non-tunai, namun juga karena kesadaran manfaat pendidikan, kesehatan bagi anak, kesejahteraan sosial lansia dan penyandang disabilitas. Di Dusun Krajan, jumlah penerima bantuan PKH atau biasa disebut KPM cukup banyak. Disamping jumlah penduduk yang cukup padat untuk sebuah penduduk Dusun, tingkat pendidikan di Dusun Krajan juga cukup rendah dan selain itu tingginya angka pengangguran juga sangat tinggi. Disisi lain faktor geografi juga sangat mempengaruhi, dimana Dusun Krajan merupakan wilayah pesisir yang mempunyai potensi yang cukup besar namun masyarakat tidak mampu untuk mengelola/mengembangkan dengan baik.

Jumlah KPM dan pendamping PKH di Dusun Krajan dapat diketahui sebagai berikut:[81]

[81] Data Keluarga Penerima Manfaat pendamping PKH Desa Campurejo Tahun 2018-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.2

Jumlah KPM Dusun Krajan Tahun2018-2019

Tahun	Jumlah KPM	Pendamping PKH
2018	318 KPM	Jumana,SE
2019	338 KPM	Jumanan, SE

Sumber: Pendamping PKH Dusun Krajan.

Untuk kepesertaan FDS terdapat beberapa macam kelompok yang dibedakan berdasarkan tahun *kohort*/angkatan KPM, adapun macam-macam kelompok tersebut, *pertama,* kelompok Reguler, yaitu terdiri dari beberapa kelompok KPM yang merupakan *kohort*/angkatan tahun 2007. *Kedua,* kelompok saturasi, yaitu terdiri dari kelompok KPM yang merupakan *kohort*/angkatan tahun 2016. *Ketiga,* kelompok pengembangan, yaitu terdiri dari kelompok angkatan 2017 ke atas.[82]

1. Pelaksanaan Progam *Family Development Sessions* Di Dusun Krajan Desa Campurejo.

Pelaksanaan progam FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo dapat dikatakan cukup baik, meskipun mempunyai jumlah KPM yang berjumlah 338 komponen dan juga jumlah kelompok yang mencapai 8 kelompok. Namun pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada yaitu satu bulan sekali melaksanakan progam FDS. Tetapi terkadang pelaksanaan progam FDS di Dusun Krajan terkendala waktu pendamping/fasilitator untuk pelaksannaanya. Karena pendamping disibukkan dengan administrasi

[82] Wawancara pak Jumanan, pendamping PKH Dusun Krajan tanggal 29 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data seperti pemutakhiran data KPM yang membutuhkan waktu yang lebih untuk mengerjakannya.

Dalam pelaksanaan FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo, dilakukan setiap kelompok di rumah Ketua kelompok maupun Aula balai Desa tergantung kesepakatan antara pendamping dan KPM . Namun terkadang pendamping juga menggabungkan kelompok. Menurut Ibu Qomiyatin, FDS di Dusun Krajan telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Pelaksanaannya dilakukan setiap 1 bulan sekali jika pendamping PKH tidak disibukkan dengan administrasi data, terkadang terlaksana setiap bulan, terkadang juga dapat terlaksana 3 sampai 6 bulan sekali. Pemberian materi dilakukan dengan menggabungkan diskusi dan berbagi pengalaman. Menurut Ibu Qomiyatin, ketua KPM kelompok 1 Dusun Krajan, Progam *Family Development Sessions* atau yang lebih dikenal sebagai pertemuan rutin (*sekolah)* dikalangan KPM. Selain memberi materi, pendamping juga terkadang menyampaikan informasi tentang seputar PKH jika ada, pemutakhiran data serta permasalahan dan kendala seputar pelaksanaan PKH.[83]

Dalam pelaksanaan progam FDS di kecamatan Panceng terkadang dilakukan dengan melibatkan para pendamping se Kecamatan Panceng (kolektif) untuk turut serta melaksanan FDS dengan cara turun bersama para pendamping ke setiap kelompok dalam suatu desa dengan membahas satu sesi materi yang ada dalam setiap modul yang digunakan. Namun berbeda

[83] Hasil wawancara dengan Ibu Qomiyatin, tanggal 8 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang dilakukan pak Jumanan di Dusun Krajan. Beliau lebih sering melaksanakan FDS secara individu guna memeratakan dan memenuhi kewajiban pelaksanaan progam FDS di Dusun Krajan.

Namun untuk materi yang telah disampaikan pendamping kepada KPM PKH di Dusun Krajan Desa Campurejo baru 2 materi, yaitu materi pendidikan dan pengasuhan anak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran KPM mengenai pentingnya peran mereka sebagai orang tua terhadap tumbuh kembang anak serta membangun pola pengasuhan yang lebih posisif. Dan modul ekonomi keluarga yang bertujuan untuk mengajarkanrkan KPM menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran, menyusun anggaran dan catatan kas harian. Menurut pendamping, hal itu karena terbatasnya waktu pendamping serta terlalu bakunya materi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Dusun Krajan.[84]

Sedangkan tempat pelaksanaan FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo dilaksanakan di Aula Balai Desa Campurejo, meskipun terkadang dilakukan di rumah KPM yang bersedia ditempati dan mempunyai ruangan yang cukup luas untuk dapat menampung seluruh kelompok KPM yang mengikuti FDS.

[84] Hasil Wawancara dengan Bapak Jumanan, pendamping PKH Desa Campurejo tanggal 14 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang nantinya dapat dianalisis dengan teori yang relevan. Hasil penelitian yang didapat berasal dari wawancara yang dilakukan dengan pendamping PKH Dusun Krajan Desa Campurejo, dalam hal ini diwakili oleh bapak Jumanan, S.E dan Ibu Uswatun Khasanah. Aparatur Desa bagian Kesra bapak Moh. Syuhudi, ketua kelompok 1, Ibu Qomiyatin . dan 2 anggota Kelompok, Ibu Inayah dan Ibu Nur Hayati yang telah mengikuti progam FDS. Hasil wawancara selanjutnya dapat digunakan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah, yaitu (A) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Progam *Family Development Sessions* di Desa Campurejo ? dan (B) Bagaimana proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo ?

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Progam *Family Development Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Untuk menganalisis data yang telah ditemukan peneliti, dan sekaligus melakukan pembahasan tentang data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan teori bentuk partisipasi Cohen dan Uphoff. Menurut Cohen dan Uphoff bentuk partisipasi terdiri dari 4 macam yang meliputi, *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi ini terutama berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. *Ketiga*, Partisipasai dalam pengambilan pemanfaatan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. *Keempat*, Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.[85] Hasil analisis yang karakteristiknya sesuai dengan Tipologi Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dan paling mendekati realita dilapangan akan menunjukan bentuk partisipasi yang ada dalam progam *Family Developmen Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

[85] Siti Irene, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 61-63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjelaskan dan menganalisis partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *Family Development Session* (FDS) di Desa Campurejo ke dalam bentuk partisipasi yang pertama, yaitu dalam pengambilan keputusan. Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepaskan dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemumakan oleh Saboff bahwa "tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan". Kemudian untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka pelaksanaanya harus didasarkan pada konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.[86]

Dalam realita dilapangan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Campurejo tertuang dalam sosialisasasi progam FDS yang dilakukan oleh pendamping PKH. Dengan cara pendamping mengundang setiap anggota kelompok melalui ketua kelompok untuk memberi tahu/mengabarkan bahwa akan ada sosialisasi progam FDS. dan kemudian menjabarkan isi dan tujuan dari progam FDS di Desa Campurejo. Sebagai progam bantuan bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait progam-progam komplemeter yang ada di dalam PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut, pendamping PKH

[86] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: setara pers, 2014), 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memastikan masyarakat terdaftar dan hadir dalam setiap progam PKH. Untuk itu, didalam sosialisasi tersebut juga terdapat sebuah kesepatan (komitmen) yang dilakukan oleh masyarakat, dimana setiap pertemuan/pelaksanaan FDS masyarakat berkewajiban untuk mengikuti/hadir. Tempat pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di balai desa dan rumah ketua kelompok. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dari setiap kelompok KPM. Masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut adalah pendamping dan Masyarakat yang menerima bantuan PKH.

Berikut peneliti memaparkan hasil wawancara di lapangan dengan narasumber antara lain meliputi Pendamping PKH Desa Campurejo, Ketua kelompok KPM dan 2 anggota Kelompok KPM. Nara sumber yang pertama yaitu Bapak Jumanan, SE dan Ibu Uswatun Khasanah, yang merupakan pendamping PKH Desa Campurejo. Berikut Jawaban dan Pendapat beliau, yaitu:[87]

> *"Dalam progam Family Developmen Sessions (FDS) atau pertemuan peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2), sebelum pelaksanaanya ada sosialisasinya mas, KPM supaya mengerti dan memahami tentang progam FDS. untuk sosialiasinya hanya pengantar dan pengenalan tentang FDS gitu saja mas. Selebihnya kita mengikuti aturan yang ada dari pusat. Kami hanya mengundang KPM mas. FDS ini anggaran dari pusat Cuma 2 juta mas untuk satu tahun, itu pun digunakan untuk operasional.*

[87] Jumanan, Wawancara, Campurejo, 24 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sependapat dengan peryataan dan jawaban Bapak Jumanan diatas, ibu Uswatun Khasanah yang merupakan istri Bapak Jumanan selaku pendamping PKH Desa Campurejo juga menjelaskan bahwa:[88]

> *"saya sosialisasi bersama pak jumanan. Bentuk sosialisasi nya ya pengenalan seputar FDS, tempat dan pelaksanaanya seperti apa, itu saya sampaikan bersama Pak Jumanan.Yang hadir ya hanya kami dengan KPM mas, kan progam ini untuk mereka dan kami sebagai fasilitator maupun pelaksanan progam. Kami tidak melibatkan masyarakat lain dalam progam ini. Untuk anggaran kalo gak salah 2 juta, dalam bentuk BOP (Biaya Operasional Progam) pendamping untuk melaksanakan progam FDS.*

Salah satu unsur bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah adanya sosialisasi atau penjabaran progam sebelum pelaksanaanya. menurut David A. Goslin berpendapat "Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.[89] Dari pernyataan David A. Goslin dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar untuk mengetahui dan memahami sebuah nilai-nilai dan norma-norma progam yang akan dilaksanakan, dimana didalamnya masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam individu maupun dalam kelompok.

Melalui sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui apa tujuan dan maksud dari progam yang akan dilaksanakan. Yang dimaksud norma dan nilai dalam hal ini adalah segala aturan, kesepakatan dan kewajiban yang

[88] Uswatun Khasanah, Wawancara. Campurejo, 24 Juni 2019
[89] Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2004), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilakukan oleh masyarakat dalam progam *Family Development Sessions* (FDS) yang ada di Desa Campurejo.

Kemudian peneliti juga mewawancarai beberapa KPM Desa Campurejo mengenai keterlibatan maupun Partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) di Desa Campurejo. Menurut Ibu Qomiyatin yang merupakan ketua kelompok 1 Desa Campurejo, beliau menyatakan bahwa:[90]

> "*sosialisasi waktu dulu bapak jumanan dan ibu Uswatun yang menyampaikan seputar progam FDS. Bahwa progam ini akan dilaksanakan setiap bulannya mas. Dan KPM wajib untuk mengikuti.*

Senada dengan pernyataan Ibu Qomiyatin, Ibu Inayah yang merupakan anggota kelompok KPM Desa Campurejo juga mengutarakan pendapatnya saat diwawancarai oleh peneliti terhadap progam FDS di Desa Campurejo. Beliau memaparkan bahwa:[91]

> *"sosialisasinya ada mas, kalo sosialisasi itu hanya sekedar mengenalkan progam FDS. Waktu itu KPM juga hadir semua mas. Kan diwajibkan. Disana kami hanya mendengarkan penjabaran progam yang disampaikan mas.*

Lebih lanjut Ibu Nur Hayati yang merupakan anggota kelompok KPM juga mengutarakan pendapatnya, Bahwa:[92]

---

[90] Qomiyatin, Wawancara, 28 juni 2019
[91] Inayah, Wawancara, 28 juni 2019
[92] Nur Hayati, Wawancara 28 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"ada sosialisasinya mas, kami diwajibkan setiap ada pertemuan bulanan kami harus hadir. Itu sudah sudah menjadi kesepakatan dari awal. Bahkan sebelum adanya progam FDS ini mas, semua progam dari PKH juga begitu".

Dari pernyataan masyarakat di atas, dapat di ketahui bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Campurejo dalam pelaksanaan progam FDS, bukan hanya berwujud sosialisasi saja. Tetapi juga berupa sebuah kesepakatan (komitmen) bersama yang terjalin antara pelaksana progam dalam hal ini adalah intansi pemerintah yaitu pendamping PKH dengan masyarakat Campurejo khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kesepatakan tersebut berupa kewajiban masyarakat penerima bantuan PKH dalam setiap progam yang ada di dalam PKH, khususnya progam FDS ini. Partisipasi tersebut tergolong sebagai partisipasi formal, dimana masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut melaksanakanya. Sehingga progam FDS dapat mencapai tujuan dan maksud dalam perencanaanya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Talizuduhu Ndraha dalam Sholekhan 2014, bahwa partisipasi secara formal adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pengambilan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukanya.[93]

[93] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pers, 2014), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dikatakan bahwa konsep partisipasi masyarakat Dusun krajan Desa Campurejo termasuk ke dalam konsep partisipasi politik, dimana kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tak berupa kekerasan (Nonviolence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang tak wajar (Tak *konvensional*) dan berupa kekerasan *(violence*), seperti *demonstrasi* (unjuk rasa), masyarakat pembangkang halus (seperti memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), hura-hura, mogok, pembangkan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.[94] Dimana masyarakat bertatap muka langsung dengan pelaksana kegiatan Progam Family Development Session (FDS) dalam rangka atau acara sosialisasi yang bertujuan untuk menjabarkan dan menjelaskan tujuan dan maksud dalam progam FDS. Serta adanya kesepakatan antara pelaksana progam dengan KPM dalam pelaksanaan progam, bahwa KPM bersedia Hadir dalam setiap kegiatan progam FDS. Kesepakatan merupakan perjanjian yang dilakukan dua pihak dalam menjalan sesuatu. Maka dalam hal ini terlihat sebuah kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan FDS. Namun partisipasi politik masyarakat belum mampu memberi saran, masukan maupun penolakan terhadap perencanaan progam. Dalam hal ini partisipasi masyarakat termasuk

[94] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tipologi partisipasi pasif, dikerenakan masyarakat menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dapat dijelaskan bahwa karakteristik partisipasi masyarakat Desa Campurejo terhadap progam *Family Development Sessions* (FDS) dalam bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan terbukti dengan adanya sosialisasi yang dilakukan masyarakat dengan pendamping sebelum pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) dan adanya kesepakatan (Komitmen) masyarakat dalam hal ini adalah keluarga penerima manfaat (KPM) dengan pendamping PKH untuk mewajibkan setiap masyarakat untuk wajib hadir dalam setiap pertemuan progam.

Partisipasi bentuk ini merupakan alternatif dengan masyarakat menuju kata sepakat tantang berbagai ide, pendapat dan usulan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam hal ini masyarakat dituntut untuk ikut dalam menentukan pelaksanaan progam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff dalam wujud dari partsipasi dalam pengambilan keputusan merupakan ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat/sosialisasi, diskusi dan tanggapan/kesepakatan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Maka bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pelakasanaan progam FDS di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Campurejo termasuk ke dalam kriteria partisipasi dalam pengambilan keputusan aktif.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Sedangkan untuk menjelaskan tentang partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) di Desa Campurejo dalam bentuk partisipasi kedua, yaitu partisipasi dalam bentuk pelaksanaan. Didalam bentuk partisipasi ini terdapat beberapa wujud keterlibatan masyarakat dalam konteks pelaksanaan. Seperti, menggerakkan sumber daya, kegiatan dan koordinasi. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.[95] Dalam realita di lapangan, partisipasi masyarakat dalam bentuk ini terjadi dari cara pendamping melibatkan ketua kelompok sebagai penggerak masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan progam FDS di Desa Campurejo. dimana tugas ketua kelompok sebagai informan pendamping yang kemudian menggerakan maksyarakat untuk hadir dalam pelaksanaan progam FDS. Partisipasi tersebut merupakan partisipasi yang baik dalam progam ini, dimana kesadaran masyarakat mulai diciptakan melalui ketua kelompok untuk ikut bertanggung jawab dan mempunyai rasa memiliki dalam pelaksanaan progam FDS di desa campurejo. Sehingga seiring berjalanya waktu mampu memnpengaruhi masyarakat lainya.

[95] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pers, 2014), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Keits Davis bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, batasan dari partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam penggambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.[96]

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang peneliti temui. Salah satunya adalah pendapat dari pendamping PKH Desa Campurejo. Berikut pendapatnya[97]:

> *"Ketua kelompok nantinya saya minta suruh memberi tahu anggotanya melalui grup Whatapp apa diberitahu langsung lagian masih satu RT saja. Untuk pelaksanaanya mas ya, biasanya pendamping melaksanakan FDS 1 bulan sekali kadang saya laksanakan bersamaan dengan resertifikasi dan pemutahiran data mas. dibalai desa atau rumah ketua kelompok. Ya antara kami dan KPM mas. Kalo mau di balai desa ya saya yang izin. Tapi kalo di rumahnya ketua kelompok ya ketua kelompok yang menyiapkan. F2DS ini absensi nya mas.".*

Senada dengan pernyataan Pak Jumanan, Ibu Qomiyatin juga mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:[98]

> *"dibalai desa atau rumah saya mas. Biasanya pak jumanan Tanya kesaya enaknya pertemuan dimana, lalu saya biasanya Tanya di grup WA. Maunya KPM lain dimana. Tapi lebih sering*

[96] Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 32
[97] Jumanan, Wawancara, Campurejo, 24 juni 2019
[98] Qomiyatin, Wawancara, Campurejo 28 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibalai desa kog mas. kalo menurut saya ya enak dirumah saya biar ga jauh-jauh. setiap pertemuan hadir semua kok mas KPM nya jarang absen dalam pertemuannya.".

Pernyataan Ibu Nur Hayati juga medukung pernyataan-pernyataan diatas. Berikut peneliti paparkan pernyataanya:[99]

"ya mbak tin (Ibu Qomiyatin) ngasih tau kalo ada pertemuan. dibalai desa dan rumahnya mbak tin mas. Saya gak tau mas, biasanya sering disana kok. Ya kami nurut aja mas kalau diajak pertemuan ya berangkat. Dapat PKH saja saya sudah bersyukur. Apalagi ada absensinya mas,"

Bapak syuhudi selaku Pemerintah Desa bagian Kesra juga mengutarakan hal sama, pernyataan beliau sebagai berikut:[100]

"Biasanya ya minta izin ke saya ataupun langsung ke Kades untuk meminjam Balai Desa kadang juga pinjam sound system. Sering kok mas saya lihat pertemuan kelompok di Balai Desa ini, entah untuk apa saya ga tau. Ada bannernya biasanya".

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) melibatkan ketua kelompok dalam mengordinasi dan menggerakan peserta untuk pelaksanaan progam. Dalam hal ini pendamping bekerja sama dengan ketua kelompok dalam mempersiapkan tempat pelaksanaan progam FDS di campurejo. Serta meminta bantuan untuk mengajak mengordinir anggota KPM dalam melaksanakan progam FDS. Wujud kegiatan juga nampak dalam partisipasi masyarakat, dimana aktif masyarakat dalam menghadiri pertemuan yang dibuktikan dengan adanya absensi dalam

[99] Nur Hayati, Wawancara, Campurejo 28 juni 2019
[100] Moh Syuhudi, Wawancara, Campurejo 26 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap pelaksanaan progam FDS. selain itu masyarakat juga mempunyai kemampuan atau saran terhadap penentuan lokasi kegiatan FDS.

Jika dikaitkan dengan konsep partisipasi politik yang dikemukakan Ramlan Surbakti bahwa kegiatan pelaksanaan progam *Family Development Session* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo, dalam hal ini masyarakat mampu mempengaruhi Pendamping dalam pembuatan keputusan pelaksanan kegiatan FDS, dimana masyarakat dapat menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo. Hal ini merupakan kesadaran yang cukup baik dalam kebijakan publik. Sebagai mana yang diungkapkan Ramlan Surbakti, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan. Termasuk kedalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana kebijakan publik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.[101]

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat Dusun Krajan Desa Campurejo berasal dari beberapa unsur masyarakat yaitu dari unsur Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pelaksanaan progam sampai pemerintah desa ikut dalam partisipasi ini. Dimana sebelum kegiatan FDS dilaksanakan, pendamping meminta pendapat darai ketua kelompok untuk menentukan tempat kegiatan FDS yang kemuadian ketua

[101] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesiaq, 1992), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok menyampaikan kepada anggota KPM untuk menyampaikan saran dan pendapatnya tentang tempat kegiatan FDS. Dengan semakin banyaknya unsur yang terlibat dalam partisipasi pelaksanaan ini akan meningkatkan keberhasilan progam. Partisipasi masyarakat tersebut juga dapat dikatakan sebagai partisipasi kolektif. Dimana masyarakat mampu mempengaruhi pemerintah yang dalam hal ini adalah pendamping PKH untuk menentukan tempat pelaksanaan progam FDS.

Partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang. Sebagaimana menurut Meriam Budiharjo, partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. namun dari paparan diatas, partisipasi secara kolektif merupakan hal yang penting karena itu diperlukan aliansi untuk melakukan agregasi kepentingan individu.[102]

Penilaian bentuk partisipasi dalam pelaksanaan bertitik kepada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas dalam pelaksanaan progam yang merupakan perwujudan yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalamn pelaksanaan terhadap progam *Family Develiopmen Sesiion* (FDS) di Dusun Krajan Desa

[102] Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Campurejo sudah sangat aktif. Hal ini terbukti dengan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan meliputi mengordinasi peserta serta keikutsertaan dan kehadiran masyarakat dalam progam FDS.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan ini merupakan partisipasi masyarakat di dalam fase penggunaan atau pemanfaatan hasil kegiatan progam. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan progam yang dapat tercapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu progam akan ditandai dengan adanya *output*. Sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa presentase keberhasilan progam yang dilaksanakan dan sesuai dengan target atau tidak.[103]

Untuk menganalisis bentuk partsisipasi ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan PKH. Adapun wawancara dengan Ibu Qomiyatin sebagai berikut:[104]

> *"Menurutku ya mas, FDS iki bermanfaat buat KPM, dimana merupakan pendidikan dan pengetahuan bagi kami selaku orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak. Sebelummnya kami ga terlalu memperhatikan berbicara dengan nada tinggi iku ga apik mas ternyata. Wajarlah, logat dan bicara kami kan seperti itu. Tapi kami mulai biasakan dengan nada rendah kog mas".*

[103] Siti Irene, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 162
[104] Qomiyatin, wawancara, Campurejo 28 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sependapat dengan Ibu Qomiyatin, Ibu Inayah juga mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:[105]

"Kalo manfaatnya mungkin biar menjadi contoh yang baik bagi anaknya mas. Saya dirumah juga kadang menerapkan apa yang saya dengar dari FDS kok mas. Seperti menemani anak belajar. Tapi ya gitu mas. Anak sekarang lebih gemar main HP dari pada belajar. Lama main hp nya dari pada belajarnya. Yang penting belajar ga lupa mas".

Ibu Nur Hayati juga menguatkan pendapat dari kedua masyarakat diatas, adapun pendapat ibu Nur Hayati terhadap manfaat progam FDS sebagai berikut:[106]

"Manfaatnya banyak mas, mulai dari mendidik anak sampai ekonomi keluarga Tapi namanya juga wanita mas. Belanjanya kan biasanya gak direm. Saya juga kadang gitu. Tapi saya terapkan kog mas pelajaran menabungnya jadi ga boros-boros belanjanya. Bisa ngatur keuangan tiap bulannya. Pokoknya bermanfaatlah mas".

Beberapa tujuan penting dari dilaksanakan progam *Family Development Sessions* (FDS) ini adalah Meningkatkan Pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejateraan keluarga. Dengan dilaksanakan progam FDS ini diharapakan terjadi perubahan opla perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari sehingga dapat merubah

[105] Inayah, Wawancara, Campurejo 28 juni 2019
[106] Nur Hayati, Wawancara, Campurejo 28 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas maupun kuantitas dalam kehidupan mereka menuju keluarga yang sejahtera.

Untuk dapat melihat pemanfaatan progam FDS berjalan dengan baik, peneliti menggunakan 2 indikator, yaitu dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan progam dan kebutuhan masyarakat dalam progam tersebut.[107] *Pertama,* dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo. Dimana masyarakat dilibatkan secara kolektif dalam pelaksanaanya. Dengan bentuk menentukan tempat pertemuan atau pelaksanaan progam. Sehingga masyarakat mengambil peran yang cukup besar dan juga dalam tingkat keaktifan atau kehadiran peserta dalam setiap kegiatan FDS. *Kedua,* kebutuhan masyarakat dalam Progam FDS. Dalam hal ini, masyarakat kurang berpartisipasi dikarena masyarakat belum ataupun tidak pernah meminta materi yang akan disampaikan dalam pertemuan progam FDS yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut pendamping PKH Dusun Krajan, Pak jumanan mengatakan bahwa untuk materi FDS ditentukan oleh pendamping PKH. Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatn terhadap pelaksanaan progam Family Development Sessions (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo adalah pasif.

Sebagaimana yang disampaikan Ramlan surbakti, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output*

[107] Novia, *partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan progam alokasi dana desa*. sociodev jurnal S1 Ilmu Sosiatri, volume 4 nomer 3 (September 2015), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik.[108] Dalam hal ini *input*, masyarakat sudah mengambil peran hadir dalam kegiatan progam FDS yang berupa pemberian materi praktis tentang komponen-komponen PKH serta mampu memberikan pengaruh terhadap pelaksanan kegiatan progam FDS. Sedangkan dalam hal *output* masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang cara dan perilaku dalam mendidik dan mengasuh anak yang baik dan benar serta masyarakat mampu membuat laporan keuangan keluarga dalam bentuk catatan kas harian, anggaran bulanan, pendapatan dan pengeluaran keuangan serta merencanakan usaha.

Sebagai mana yang disampaikan beberapa warga masyarakat penerima bantuan PKH sebagai berikut, yaitu Ibu Qomiyatin:

> *"ya perilaku mendidik dan mengasuh anak yang baik dan benar mas dan saya sekarang bisa mencatat kas keuangan harian mas".*

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Rosydatun Nisa' yang menguatkan pendapat Ibu Qomiyatin diatas, sebagai berikut:

> *"merubah prilaku mendidik dan mengasuh anak mas serta mencatat dan mengatur keuangan keluarga dalam buku"*
> .

Dijelaskan lebih detail lagi oleh Ibu Inayah tentang bentuk manfaat yang dapat diperoleh oleh KPM dalam progam FDS yaitu sebagai berikut:

> *"pemaham untuk mendidik dan mengasuh anak dirumah mas, bagaimana berprilaku, berbicara dan bersikap di depan anak. Dan*

[108] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga ada pelajaran hitung jugas mas. Bisa untuk menghitung pengeluaran belanja maupun memperkirakan belanja".

Partisipasi merupakan hal yang erat kaitannya dengan keberhasilan suatu progam. Progam dinilai berhasil atau tidaknya terlihat dari bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaannya. Dengan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaa progam tersebut, nantinya akan diketahui bagaimana respon masyarakat dan seperti apa pola pikir masyarakat. Ketika sikap partisipasi di masyarakat sudah terbangun maka terlihatlah perkembangan pemikiran masyarakat akan kesadarannya terhadap kondisi yang mereka alami. Dalam konteks pemanfaatan. Partisipasi adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta dalam proses pelaksanaan progam dan bagaimana cara mengaplikasikan apa yang didapat dari progam, keputusan atau tindakan apa yang harus diambil untuk menghadapi masalah yang selama ini mereka alami.[109]

Dalam bentuk partisipasi pengambilan pemanfaatan masyarakat di Dusun Krajan Desa Canmpurejo, Kondisi yang terjadi bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pemanfaatan program *Family Development Sessions* (FDS). Wujud partisipasi yang dilakukan masyarakat itu berupa memanfaatkan pengetahuan dan sikap maupun perilaku dalam mendidik atau mengasuh anak maupun dalam ekonomi

[109] Deo Adenansi dkk, "*Partisipasi masyarakat dalam progam pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri*", Jurnal Prosding KS: Riset & PKM, vol. 2 N0. 3 (ISSN: 2442-4480), 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga mereka dengan cara menerapkan pola sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat akan merubah *mindset*nya agar mulai merubah kondisi sosial yang di alaminya maupun terhadap lingkungannya, memiliki sikap optimis dan semangat yang tinggi untuk merubah kehidupan yang lebih baik serta berpikir kritis terhadap kemiskinan yang terjadi di masyarakat Campurejo.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa. Dari segi kualitas, dengan ikut dalam pelaksanaan progam FDS dapat merubah sikap dan pola perilaku masyarakat yang selama ini mereka gunakan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti, mendidik dan mengasuh anak yang lebih baik lagi. Masyarakat menyadari bahwa budaya mereka terhadap tata cara berbicara dengan menggunakan kata dengan nada tinggi ternyata merupakan kebiasaan buruk dalam mengasuh dan mendidik anak masyarakat selama ini. Serta masyarakat mulai mengetahui cara yang baik dalam meminjam dan mengelola keuangan dalam keluarga. Dimana masyarakat dulunya memahami bahwa meminjam uang dilembaga apapun persentase bunga dan cicilan akan tetap sama. Tetapi setelah mendapat dan melaksanakan progam FDS, masyarakat mulai merubah perilaku meminjam di bank keliling/rentenier. Dan mulai membiasakan mengatur keuangan dalam pengeluaran dan pemasukan keuangan serta membudayakan menabung.

Sedangkan dari segi kuantitas, masyarakat belum mampu untuk keluar dari kemiskinan yang mereka alami dan masih bergantung atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan bantuan PKH untuk kehidupan mereka. Dimana dalam progam ini, belum mencakup dalam peningkatan perekonomian keluarga penerima manfaat (KPM). Sehingga persentasi graduasi mandiri KPM di Desa Campurejo sangat rendah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dapat dikatakan pasif.

4. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.[110] Partisipasi dalam hal ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan progam secara menyeluruh. Baik dari perencanaan pelaksanaan (kesepakatan), pelaksanaan progam dan pemanfaatan progam. Yang kemudian pelaksana progam mengajak masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap keseluruhan tahapahan progam tersebut dan melakukan kesimpulan. Secara formal, evaluasi program *Family Development Sessions* (FDS) dusun Krajan Desa Campurejo telah dilaksanakan oleh intansi yang berkepentingan, yaitu masing-masing dinas dan pemerintah kabupaten melalui laporan pendamping setiap bulanya namun belum pernah mengikutsertakan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat rendah pada saat evaluasi. Masyarakat hanya berpartisipasi secara non formal dengan memberikan masukan terkait

[110] Siti Irene, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program yang sudah dilaksanakan selama ini secara lisan dalam kesempatan pertemuan kelompok dalam progam FDS.

Menurut pengertian istilah "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Arikunto dan Cepi, Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Uzer Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.[111]

Dari beberapa pengertian diatas, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses dalam mencari informasi tentang

[111] Nur Hidayah, *"Evaluasi kegiatan partisipasi masyarakat pada progam penataan lingkungan berbasis komunitas (PLPBK) studi kasus: proyek pembangunan kali ciberudesa ciledug Kabupaten Banten",* Jurnal, vol. 2 no. 1 (desember 2018), hal 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang telah dilakukan atau dikerjakan untuk kemudian mendapatkan suatu alternatif keputusan untuk menjalankan progam.

Untuk dapat menganalisis, berikut peneliti memaparkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat, dalam hal ini peneliti akan menyajikan pernyataan dari Bapak Jumanan sebagai berikut:[112]

> *"ada mas, bagi kami pendamping, ada evaluasi pelaksanaan dan kehadiran KPM dalam bentuk laporan bagi kami. Nanti laporanya dikirim tiap bulan ke UPPKH Kabupaten. Tetapi untuk melibatkan masyarakat belum pernah mas"*

Sependapat dari pernyataan Bapak Jumanan. Ibu Uswatun Khasanah juga menyatakan pernyataanya sebagai berikut:[113]

> *"untuk selama ini tidak ada evaluasi dari progam FDS mas, hanya ada laporan absensi progam FDS yang kami kirimkan ke Peksos atau UPPKH kabupaten sebagai laporan bulanan pendamping".*

Dalam realita partisipasi masyarakat dalam bentuk evaluasi di Dusun Krajan Desa Campurejo, wujud dari partisipasinya adalah adanya laporan setiap bulannya dalam bentuk absensi kehadiran yang diberikan kepada Kordinator Kabupaten PKH sampai Kordinator pusat sebagai bentuk kewajiban pendamping. Sementara untuk evaluasi bersama masyarakat belum pernah dilakukan oleh pendamping. Hal tersebut mengurangi partisipasi masyarakat dalam evaluasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam evaluasi hanya sebatas laporan pendamping.

---

[112] Jumanan, Wawancara, Campurejo, 24 juni 2019
[113] Uswatun Khasanah, Wawancara. Campurejo, 24 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah program pada tahap evaluasi, Evaluasi penting dilakukan untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif dalam pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi tersebut akan menjadi sangat penting pada proses akhir dari program tersebut. Evaluasi program dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang masyarakat rumuskan jika program tersebut sudah dilaksanakan.

Dalam Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, Evaluasi adalah kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan PKH dengan menggunakan indikator dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dari seluruh tahapan pelaksanaan progam. Kegiatan evaluasi didasarkan atas hasil dampak pelaksanaan PKH. Tujuannya adalah mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan, mengetahui dan menganalisa hal-hal lain yang mungkin timbul di luar yang telah direncanakan dan memberikan masukan kepada penanggung jawab PKH mengenai upaya perbaikan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Hasil dari proses evaluasi disajikan dalam bentuk laporan yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dan rumusan kepada pemangku kepentingan.[114]

[114] Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupanya.[115]

Maka partisipasi politik masyarakat dalam evaluasi sangat penting dan tidak seharusnya terjadi partisipasi apatif seperti ini, karena ini menyangkut hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan tentang partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi progam FDS di dusun Krajan Desa Campurejo menyatakan bahwa masyarakat tidak diikutsertakan dalam evaluasi hasil-hasil progam FDS, sehingga masyarakat tidak mengetahui sejauh mana manfaat dan pelaksanaan yang sudah mereka dapatkan dan akhirnya secara bersama-sama merasa terserah, pasrah dan acuh dengan pendamping dalam pelaksanaan progam FDS yang telah direalisasikan dan rancangan berbagai program FDS pada tahap berikutnya. Dengan hal

[115] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, partisipasi masyarakat Desa Campurejo dalam evaluasi dapat dikatakan apatis.

Partisipasi politik apatis adalah menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan kelompok disebut partisipasi apatis.[116]

Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi dapat dikatakan sebagai kecakapan partisipatoris, dimana masyarakat mampu untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan maupun *stakeholder* terkait dengan pelaksaaanya. Meskipun masyarakat belum mampu menyentuh tahap perencanaan dalam Progam Family Development Sessions (FDS) ini. Dalam muncunnya Progam ini, memang dirancang oleh Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan *Word bank* dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan belajar. Karena metode seperti FDS ini telah banyak membantu masyarakat miskin di negara yang tingkat kemiskinannya tinggi untuk hidup sejahtera, Namun dalam realitanya, masyarakat mampu mengambil peran yang lebih dalam pelaksanaanya.

Sebagai bentuk demokrasi, partisipasi masyarakat harus mempunyai dua kecakapan dalam meningkatkan budaya demokrasi, sebagaimana yang disampaiakan T*he Nation Standard for Civics and*

[116] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Government, bahwa warga negara harus memiliki dua kecakapan utama, yaitu kecakapan intelektual dan kecakapan partisispatoris. Kecakapan intelektual meliputi kemampuan mengidentifikasi, mendiskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi posisi, mengambil sikap/posisi, dan membela posisi. Sedangkan, kecakapan partisipatoris meliputi kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan kepeutusan dengan bekerja sama dengan yang lain, memaparkan dengan gamblang suatu masalah ynag penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan, membangun koalisi, negoisasi kompromi dan mencari konsensus, serta mengelola konfilk.[117]

Kecakapan intelektual dan kecapakan partisipatoris seharusnya perlu dikembangkan diseluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat bisa menyadari betapa penting dan manfaatnya peran dan pendapat mereka terhadap setiap pengambilan kebijakan atau keputusan publik di Daesa campurejo.karena dengan Peran dan pendapat yang akan terbentuk bisa menjadikan demokrasi tidak hanya sebatas pada unsur formalitas saja, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan bernegara, baik pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kebijakan.

Adapun data dilapangan yang sudah dianalisa menggunakan bentuk-bentuk partisipasi diatas dapat disimpulkan dalam tipologi partisipasi kegiatan pelaksanaan progam *Family Developmen Sessions*

[117] Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo degan Konsep yang dikemukanan Ramlan Surbakti. Bahwa Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.[118] Berikut hasil tipologi pelaksanaan FDS di Desa campurejo:

Table 4.1

Tipologi Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan progam FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo.

No	Narasumber	Data	Bentuk Partisipasi
1.	Bapak Jumanan, SE (pendamping PKH, usia 54 tahun)	• Sosialisasi aktif • Pelaksanaan FDS aktif, sebagai pelaksana maupun pemateri • Pemanfaatan pasif	Partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi

[118] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesiaq, 1992), 140-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		• Evaluasi aktif	
2.	Ibu Uswatun khasanah (pendamping PKH, Usia 45 tahun)	• Sosialisasi aktif • Pelaksanaan FDS aktif, sebagai pelaksana maupun pemateri • Pemanfaatan pasif • Evaluasi aktif	Partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan
3.	Bapak Moh. Syuhudi (Kesra, usia 67 tahun)	• Sosialisasi pasif. • Pelaksanaan cukup aktif, sebagai pihak pemerintah pemberian izin tempat maupun pelaksanaan di balai desa. • Pemanfaatan apatis • Evaluasi apatis	Partisipasi pelaksanaan
4.	Ibu Qomiyatin (Ibu rumah tangga, 59 tahun)	• Sosialisasi pasif, • Pelaksanaan cukup aktif, sebagi peserta • Pemanfaatan pasif • Evaluasi pasif	Partisipasi pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan
5.	Ibu Nur Hayati (Ibu rumah tangga, 37 tahun)	• Sosialisasi pasif • Pelaksanaan cukup aktif, sebagai peserta • Pemanfaatan pasif • Evaluasi apatis	Partisipasi pelaksanaan dan pemanfaatan
6.	Ibu Inayah (Ibu rumah tangga, 39	• Sosialisasi pasif • Pelaksanaan cukup	Partisipasi pelaksanaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	tahun)	aktif, sebagai peserta • Pemanfaatan pasif • Evaluasi apatis	pemanfaatan

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat Desa Campurejo terhadap pelaksanaan progam FDS lebih termasuk dalam partipasi pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan, ada beberapa masyarakat yang termasuk dalam partisipasi pengambilan keputusan yaitu Bapak Jumanan dan Ibu Uswatun Khasanah selaku pendamping PKH dan pelaksana progam, serta ketua kelompok KPM, dalam hal ini salah satunya adalah Ibu Qomiyatin. Sedangkan untuk partisipasi dalam pelaksanaan, seluruh masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya termasuk Bapak Moh Syuhudi selaku Kesra Desa Campurejo yang ikut serta dalam mengizinkan penggunaan balai Desa sebagai tempat FDS. Untuk partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, hampir seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemanfaatannya. Kecuali Bapak Moh Syuhudi karena beliau tidak terlibat dalam pelaksanaan progam FDS. Sedangkan untuk partisipasi dalam evaluasi, seluruh masyarakat tidak mengikuti partisipasi tersebut kecuali Bapak Jumanan dan Ibui Uswatun Khasanah selaku pendamping PKH dan pelaksana progam, evaluasi progam FDS dilakukan oleh UPPKH pusat dengan memantau daftar hadir dan perkembangan perilaku KPM melalui Pendamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua ini, yaitu proses para penerima progam mendapatkan manfaat dari *Family Development Sessions (FDS)* di Dusun Krajan Desa Campurejo. Peneliti akan memaparkan wawancara dari beberapa masyarakat. Adapun masyarakat tersebut adalah Ibu Qomiyatin, beliau mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

> "*Isinya ada materi dan permainannya mas. Ya pendamping menyampaikan materi dan sesekali melakukan permainan mas. Waktunya kurang lebih 2 jam an. Dilaksanakan sebulan sekali, tapi terkadang sampai 3-6 bulan sekali pertemuanya mas, ga ngerti aku.biasanya ya saya dikasih buku untuk dibaca dan dipelajari. Kemudian nanti ada Tanya jawab seputar sesi yang dibahas. Kadang ya berbagi pengalaman mas. isinya materi pendidkan dan pengasuhan anak dan ekonomi keluarga. ya pasti ada perubahan lah mas wong tujuannya juga baik kog. Meskipun sedikit tapi diterapkan. ya perilaku mendidik dan mengasuh anak yang baik dan benar mas dan saya sekarang bisa mencatat kas keuangan harian mas.*"

Ibu Nur Hayati juga mengungkapkan pendapatnya tentang proses pengambilan manfaat FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo, sebagai berikut:

> *"kalo kami ya nurut aja mas, kalo ada pertemuan ya berangkat. Kan sudah komitmen dari awal. ya hadir semua mas, ada absensinya, isinya ada materi sama permainanya mas, lumayan lama sih 2 jam an. Kalo pertemuan disuruh jelasin sama ditanyain, ya meski ga semua mas. Kalo semua ya waktunya kelamaan bosan. Kadang ada permainannya kok. saya sekarang bisa menghitung mas. manfaatnya bannyak mas, mulai dari mendidik anak sampai*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi keluarga. Kami diajari menghitung belanja dan gaji suami. Lalu cara menabung juga mas".

Sedangkan pendapat yang diutarakan Ibu Inayah dalam proses pengambilan manfaat Progam FDS di Dusun Krajan sebagai berikut:

"*Kalo isinya ada materi mas, lalu kadang ada permainannya. Lucu mas. Kami ya nurut aja. 2 jam an mas. Kadang di balai desa kadang juga dirumahnya Bu tin. Siang mas biasanya, ilmu Tentang cara berperilaku mendidik dan mengasuh anak serta ekonomi keluarga mas ya cukup besar sih mas, ya pasti diterapkan, tapi mungkin karena sudah kebiasaan jadi sering lupa mas. Sering keceplosan. Ada beberapa penegtahuan baru disini. pemaham untuk mendidik dan mengasuh anak dirumah mas, bagaimana berprilaku, berbicara dan bersikap di depan anak. Dan juga ada pelajaran hitung jugas mas. Bisa untuk menghitung pengeluaran belanja maupun memperkirakan belanja. menurut saya dari ilmunya mas, kami bisa mendapat pengetahuan baru dari progam FDS ini, mulai dari mengasuh anak sampai menghitung keuangan".*

Kemudian bapak Jumanan sebagi pendamping Dusun Krajan Desa Campurejo menjelaskan proses pengambilan manfaaat progam FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo sebagai berikut:

"untuk pelaksanaan FDS, biasanya kami lakukan di balai desa mas, tempatnya kan luas, cukup bagi KPM. kadang juga di rumahnya ketua kelompok. Waktunya maksimal 2 jam setiap sesinya. Harinya hari biasa, kadang siang kadang juga sore, yang penting tidak mengganggu aktivitas KPM. Kadang tak kasih buku pintar untuk bahan bacaan. Isinya tidak melulu materi mas, kami selingi permainan dan guyonan biar seru. meski begitu masih saja ada KPM yang diam mas". pengetahuan, kewajiban memanfaatkan layanan dan cara berperilaku dalam sehari-hari. Kan isinya ada pendidikan dan pengasuhan anak, ekonomi keluarga. Kesejahteraan social lansia dan disabilitas. Kesehatan dan gizi dan perlinduingan anak. kami kan baru sampai 2 materi mas, yaitu pendidikan dan pengasuhan anak serta ekonomi keluarga. Untuk PPA bentuknya itu berupa kesadaran KPM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mendidik dan mengasuh anak dirumah. Biar baik dan benar. Sedangkan untuk ekonomi keluarga berbentuk rencana usaha, anggaran usaha, mengolah keuangan usaha, serta menghitung pendapatan dan pengeluaran keluarga, catatan kas harian dan rencana kebutuhan keluarga mas.".

Sependapat dengan Bapak Jumana, Ibu Uswatun Khasanah juga mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

"Pelaksanaanya setiap bulan mas, itupun kalau kami tidak disibukan dengan administrasi data. Durasinya selama 2 jam mas. Dalam pelaksanaanya juga kelihatan antusias, isinya bukan hanya materi kog, tapi ada permainannya. banyak ilmunya mas dalam progam FDS ini, ya semoga dimanfaatkan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. didalam modul tersebut ada cara untuk mengasuh dan mendidik anak yang baik mas, bisa dipraktekan dirumah. Untuk yang ekonomi itu ada belajar menghitung mulai dari usaha sampai keuangan keluarga. Istilahnya calistung mas."

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa proses pengambilan pemanfaatan dilakukan dengan cara menerapkan perilaku serta cara mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan benar sehingga mampu meningkatkan kualitas keluarga dengan pengauhan anak dengan baik, serta KPM dapat mengatur keuangan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan perkonomian keluarga dengan cara pandai menabung, membuat catatan kas harian, anggaran kebutuhan, rencana usaha dan lain sebagainya yang menyangkut keuangan keluarga.

Berikut peneliti menggambarkan perubahan masyarakat dalam pengambilan manfaat progam *Family Development Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik , sebabagi berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2

Proses perubahan KPM dalam progam FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo.

No	Nama	Input	Output
1	Jumanan,SE	Memberi buku pintar untuk bacaan KPM, materi, permainan dan sesekali lelucon	Pengetahuan, kewajiban memanfaatkan layanan pemerintah dan cara berperilaku sehari-hari dalam bentuk kesadaran dalam mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan benar dirumah serta dapat merencanakan usaha, membuat anggaran usaha dan membuat catatan kas harian, rencana kebutuhan keluarga
2	Uswatun Khasanah	Materi dan permaianan selama 2 jam.	*cara untuk mengasuh dan mendidik anak yang baik, bisa dipraktekan dirumah. Untuk yang ekonomi itu ada belajar menghitung mulai dari usaha sampai keuangan keluarga. Istilahnya calistung".*
3	Qomiyatin	Materi, membaca dan mempelajari Buku Pintar. Tanya jawab tetntang sesi yang dibahas. Sharing dan diskusi serta sesekali permainan.	Perilaku mendidik dan mengasuh anak yang baik dan benar dan sekarang dapat mencatat kas keuangan harian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Nur Hayati	*Selain terdapat materi dan permaiana. Setiap pertemuan diminta menjelaskan dan diberi pertanyaan seputar materi yang disampaikan,*	*Pandai mendidik anak sampai ekonomi keluarga. Kami diajari menghitung belanja dan gaji suami. Lalu cara menabung juga,*
5	Inayah	Materi yang diselingi dengan permainan	*Pemaham untuk mendidik dan mengasuh anak dirumah mas, bagaimana berprilaku, berbicara dan bersikap di depan anak. Dan juga ada pelajaran hitung jugas mas. Bisa untuk menghitung pengeluaran belanja maupun memperkirakan belanja*

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Progam FDS. Peneliti menggunakan teori yang diambil dari beberapa literature yang kemuadian digunakan untuk menganalisis data yang telah ditemukan oleh peneliti, adapun teori tersebut, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. *Pertama,* Faktor internal, yaitu mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan atau aktivitas dan kepemilikan tanah. *Kedua,* Faktor eksternal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut, antara lain pengurus Desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, NGO, pihak ketiga (LSM, Yayasan sosial, Perguruan Tinggi).[119]

Data yang digunakan peneliti dalam menganailis faktor internal dan ekternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah data dari Pemerintah Desa Campurejo yang diperkuat dengan observasi lapangan peneliti dalam mengamati masyarakat.

Untuk **Faktor Internal** yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap progam *Family Development Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo yaitu: *Usia*, Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan progam kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih tinggi, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya. Mayoritas umur rata-rata KPM di Desa Campurejo yang mengikuti progam FDS adalah 35 tahun sampai 50 tahun. Progam FDS ini berorientasi kepada masyarakat yang mempunyai komponen PKH, dalam kata lain mayoritas usia produktif sampai lansia.

Pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap

[119] Siti Robiah Nurbaiti dan Azis Nur Bambang, "*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*", jurnal sosial Volume 14, Nomor 1 (Oktober 2017), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk pendidikan, masyarakat yang mengikuti kegiatan FDS adalah rata-rata lulusan SMA. Bahkan ada yang hanya sampai bangku SMP.

Agama. Agama merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Di Indonesia sendiri agama satu dengan lainya sulit untuk saling menghormati dan menghargai. Sementara agama yang dianut masyarakat Dusun Krajan Desa Campurejo secara keseluruhan adalah Islam.

Pekerjaan dan penghasilan. keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan dalam perekonomian. Untuk pekerjaan dan penghasilan masyarakat Dusun Krajan merupakan kebanyakan Ibu Rumah tangga. sedangkan suami mereka adalah nelayan.

Jarak lokasi kegiatan. Jarak lokasi kegiatan juga merupakan faktor pengaruh partisipasi. Dimana masyarakat yang memiliki akses jauh dari lokasi kegiatan merupakan masyarakat yang jarang ikut berpartisipasi, sedangkan akses yang dekat merupakan paling sering berpartisipasi. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarak rumah dengan lokasi FDS bisa terbilang cukup jauh, dikarenakan luasnya wilayah Desa Campurejo.

Jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarat. Masyarakat berjenis kelamin lelaki lebih dominan dalam berpartisipasi dari pada masyarakat perempuan karena permasalahan gender masih kental dalam masyarakat pinggiran maupun tradisional. Sedangkan masyarakat Dusun Krajan masih dapat dikatakan termasuk Masyarakat pinggiran atau tradisonal. Namun mayoritas masyarakat penerima bantuan PKH adalah Ibu-Ibu.

Sedangkan **Faktor Eksternal**, dalam hal ini Pemerintah Desa Bagian Kesra Desa Campurejo tidak berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena tidak terlibat secara langsung didalam progam FDS di Dusun Krajan. Dan juga tokoh masyarakat juga tidak terlibat dalam progam FDS. Sehingga partisipasi masyarakat dalam progam FDS di Dusun Krajan lebih banyak dipengaruhi oleh Faktor internal.

Dalam setiap kegiatan pelaksanaan progam, pastinya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik mendukung kegiatan pelaksanaan progam hingga menghambat kegiatan pelaksanaan progam. Dibawah ini peneliti memaparkan data temuan peneliti terhadap pelaksanaan progam FDS di Dusun Krajan Desa Campurejo.

Berikut peneliti memaparkan hasil wawancara dengan pendamping PKH yaitu Bapak Jumanan, beliau menyatakan bahwa:[120]

[120] Jumanan, Wawancara, Campurejo, 24 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"untuk faktor pendukung mas, mungkin cara kami dalam menyampaikan materi yang diselingi dengan guyonan dan memperbanyak permainan mas. Biar terlihat tidak terlalu formal. kami juga cukup terbantu dengan adanya alat pendukung yang ada karena dapat menarik minat KPM. dan dapat memudahkan kami menjelaskan isi materi yang ada kepada KPM. Buku pintar juga mendukung mas, didalamnya ada penjelasan dan pengetahuan tentang modul yang kami pakai untuk materi".

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jumanan, Ibu Usawatun khasanah juga berpendapat bahwa:[121]

"mungkin untuk faktor pendukungnya itu alat pendukung dan buku pintar mas. Karena dengan alat dan buku pintar tersebut memudahkan kami dalam menarik perhatian KPM. Jadi biar lebih aktif KPM nya.

Selanjutnya peneliti mewawancara Ibu Qomiyatin tentang pendukung keterlibatan masyarakat dalam progam FDS, berikut pernyataanya:[122]

"mungkin dari kewajiban kami mas sebagai KPM yang harus mengikuti progam ini, kalo ga ada absensi mungkin masyarakat bakal ga mengikuti progam ini".

Dari beberapa pendapat dan pernyataan masyarakat dapat dijelaskan bahwa selama ini yang mendukung partisipasi masyarakat

[121] Uswatun Khasanah, Wawancara, Campurejo, 24 Juni 2019
[122] Qomiyatin, Wawancara, Campurejo 28 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaan progam *Family Development Sessions* (FDS) di Desa campurejo meliputi, alat bantu ajar FDS seperti buku pintar, modul. Improvisasi penyampaian materi dan absensi.

Selain terdapat faktor pendukung, pastinya tidak dapat terlepas dengan faktor yang menghambat setiap kegiatan pelaksanaan progam. Karena kedua faktor tersebut yang meliputi setiap kegiatan masyarakat.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat, berikut hasil wawancara dengan Bapak Jumanan :[123]

> *"faktor penghambatnya bebrapa peserta kurang aktif mas dalam materi FDS, banyak diam dan suka mendengarkan saja. Maklum sudah tua-tua. Dan tidak adanya alat pendukung seperti, proyektor, sound system dan viodeo player. PKH tidak memfasilitasi alat tersebut. Tempat yang layak untuk pelaksanaan progam FDS, kadang balai Desa juga dipakai untuk kegiatan Desa. Jadi harus menyesuaikan jadwal kegiatan Desa. Kalo dilaksanakan dirumah ketua kelompok malah kesempitan mas. Kasihan peserta. Rumah KPM rata-rata sempit dan kecil".*

Hasil wawancara dengan Pak Jumana juga diperkuat oleh Ibu uswatun Khasanah berikut beliau memaparkan pernyataanya:[124]

> *"Faktor penghambatnya itu banyaknya kelompok yang ada di Desa Campurejo mas. Kami selalu kuwalahan dalam ngatur waktu*

[123] Jumanan, Wawancara, Campurejo, 24 juni 2019
[124] Uswatun Khasanah, Wawancara, Campurejo, 24 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanan progam FDS. Bayangkan dalam sebulan saya melaksanakan FDS 11 kali. Belum ngurus data KPM. Dan kebiasaan KPM mas, sering datang telat, terkadang kami harus nunggu satu jam. Datengnya satu persatu mas. Daerah sini memang terkenal jam karetnya mas. Dan juga jika FDS dilaksanakan dirumah KPM itu gak muat. Maklum mas daerah sini memang padat dan rumahnya kecil-kecil kalu dipaksakan dibalai desa juga jaraknya tertlalu jauh dari rumah KPM lainya. Jadi ya terpaksa berhimpitan dan seadanya".

Sementara dari masyarakat, ibu Qomiyatin mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:[125]

"kalo kendala yang saya rasakan selama ini mungkin dari segi ketepatan waktunya mas, warga sini terkenal jam karetnya. sering molor pelaksanaanya. KPM datangnya terlambat terus. Sedangkan kalo kesorean biasanya suami saya pulang dari mencari ikan, dan saya yang menjual ikan tersebut".

Sedangkan pendapat lain diperoleh melalui Ibu Inayah sebagai berikut:

"jauh mas rumah saya dengan balai desa kalo rumahnya bu tin masih lumayan".

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan progam *Family Develoipment Sessions* (FDS) di Desa Campurejo adalah peserta kurang aktif dalam kegiatan, fasilitas

[125] Qomiyatin, Wawancara, Campurejo 28 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung seperti Sound system dan proyektor, banyaknya kelompok dan jarak kegiatan FDS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Masyarakat Dusun Krajan Desa Campurejo terbilang pasif terhadap pelaksanaan progam *Family Developmen Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo. Hal ini dapat dilihat dari bentuknya, yaitu:
   a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, dimana tidak semua pengambilan keputusan ada di tangan masyarakat, adapun keputusan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan *Family Developmen Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo adalah ikut dalam sosialisasi dan adanya komitmen (kesepakatan) antara pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan. Maka partisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat Dusun Krajan dapat dikatakan Pasif.
   b. Partisipasi dalam pelaksanaan, dimana sebagian besar masyarakat Desa campurejo ikut berpartisipasi dalam progam *Family Development Sessions* (FDS) di desa campurejo seperti ikut terlibat dalam penentuan lokasi FDS dan menghadiri acara FDS. Maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dapat dikatakan aktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Partisipasi dalam pemanfaatan, dalam hal ini masyarakat dapat mengambil banyak manfaat dengan adanya progam *Family Developmen Sessions* (FDS) ini. Mereka menerapkan apa yang diperoleh dalam program tersebut. Maka partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan progam FDS dapat dikatan aktif.

d. Dalam konteks evaluasi, masyarakat tidak terlibat/dilibatkan dalam memberikan penilaian atau masukan terhadap pelaksanaan progam *Family Developmen Sessions* (FDS) di Dusun Krajan Desa Campurejo, dikarenakan evaluasi dilakukan di tingkat instansi yang berkepentingan dalam progam PKH. Maka partisipasi masyarakat terhapat evaluasi progam FDS dapat dikatan Apatis.

2. Manfaat pelaksanaan progam Family development Sessions (FDS) masyarakat Dusun Krajan Desa Campurejo diperoleh melalui materi, permainan, diskusi, tanya jawab, sharing dan buku pintar. Serta dalam bentuk manfaat dapat memperoleh kesadaran dalam mendidik dan mengasuh anak dan mampu membuat catatan kas harian, anggaran bulanan, pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga, rencana usaha, anggaran usaha dan memulai usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, supaya partisipasi masyarakat terhadap progam *Family Developmen Sessions* (FDS) dapat lebih tinggi lagi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendamping PKH sebaiknya memberi ruang yang lebih terhadap masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi dalam progam *Family Developmen Sessions* (FDS).
2. Pemerintah Desa Campurejo seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa terhadap progam *Family Developmen Sessions* (FDS) di Desa Campurejo Khususnya bagian Kesejahteraan rakyat.
3. Masyarakat Desa Campurejo seharusnya meningkatkan kesadaran dalam berpartisipasi dalam progam *Family Developmen Sessions* (FDS) untuk kebaikan bersama.
4. Masyarakat harus menyadari hak dan kewajiban dalam progam *Family Developmen Sessions* (FDS).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rodliyah, Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013).

Tim Penyusun KBBI..Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992)

Sastropoetro, Santoso R.A. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional (Bandung: Alumni.1988).

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung CV ALFABETA, 2013)

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi "mixed Methode" (Bandung: Alfabeta, 2011)

Suharsaputra, Uhar, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. (Bandung, PT Refika Aditama).

Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat (Malang: Setara Pers, 2014)

Siti Irene, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Dwiyanto indiahono, Kebijakan publik berbasis dynamic policy analisis, (Yogyakarta: Gava Media, 2017)

Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), terj.Ricky Istamto (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

Khairuddin H., Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: Liberty, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Ridha suaib, Pengantar Kebijakan Public Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Admisnistrasi Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan (Yogyakarta : Calpulis, 2016)

Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

Ihrom, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004)

B. Website.

http://keluargaharapan.com/apa-itu-family-development-session-fds-program-keluarga-harapan-dan-manfaat-nya/

https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan

https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan/family-development-session

https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dokumen

C. **Hasil wawancara.**

Dokumen Pemerintah Desa casmpurejo, “Profil Desa Campurejo Tahun 2018”.

Dokumen pemerintah Desa Campurejo, “Gambaran UMUM Desa Campurejo Tahun 2018”.

Jumanan, Wawancara, Campurejo, 6 mei 2019

Jumanan, Wawancara, Campurejo, 24 juni 2019

Uswatun Khasanah, Campurejo, 24 Juni 2019

Moh Syuhudi, wawancara,26 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qomiyatin, wawancara, 28 juni 2019

Inayah, wawancara, 28 juni 2019

Nur Hayati, Wawancara 28 juni 2019

D. **Dokumen.**

Pedoman umum Progam Keluarga Harapan Tahun 2016

Pedoman umum Progam Keluarga Harapan Tahun 2017

Pedoman Umum PKH 2018

Pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2019

Badan Pusat Statistik jatim tahun 2018

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018. Pasal 5, 6-7

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Social, kebijakan pelaksanaan progam keluarga harapan Tahun 2017. Disampaikan pada diklat family development session.Padang, 9 maret 2017.

Fikri Nurcahya, 2015, Evaluasi Program Family Develompent Session Di Desa Kebundalem Lor, Prambanan, Klaten (Studi Survei Di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Prambanan), Skripsi, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikanuniversitas Negeri Yogyakarta.

Ayu Tifani Kartika Putri, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Studi Pada Kegaiatan Family Devlopment Sessions Di Desa Manduro Manggunggajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Jurnal . Jurusan Ilmu Admisnistrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum.Universitas Negeri Surabaya.

Andrena Simanjuntak, 2016, Respon Masyarakat Dalam Pelaksanaan Progam Family Development Sesion (FDS) di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas. Skripsi Jurusan Departemen Ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan Sosial.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan

Siti Robiah Nurbaiti dan Azis Nur Bambang, "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (*CSR)*", jurnal sosial Volume 14, Nomor 1 (Oktober 2017)

Novia, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Progam Alokasi Dana Desa. sociodev jurnal S1 Ilmu Sosiatri, volume 4 nomer 3 (September 2015)

Deo Adenansi dkk, "*Partisipasi masyarakat dalam progam pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri*", Jurnal Prosding KS: Riset & PKM, vol. 2 N0. 3 (ISSN: 2442-4480)

Nur Hidayah,"Evaluasi kegiatan partisipasi masyarakat pada progam penataan lingkungan berbasis komunitas (PLPBK) studi kasus: proyek pembangunan kali ciberudesa ciledug Kabupaten Banten, Jurnal, vol. 2 no. 1 (desember 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id